



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2021**

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

1. Erly Adhitama, S.IP (Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan)
2. Dion Renaldhi, S.Sn (Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur)
3. Novi Arini, S.Hum (Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur)

KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam pembentukan kelembagaan perangkat Daerah secara tepat fungsi (*right function*) dan tepat ukuran (*right sizing*). Hal tersebut perlu dilaksanakan agar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta tersinkronisasi dan selaras dengan program-program kerja dari Pemerintah Pusat. Selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 beserta perubahannya, pembentukan kelembagaan perangkat Daerah juga wajib memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini untuk menjamin agar seluruh urusan pemerintahan yang perlu diselenggarakan oleh Daerah dapat terselenggarakan dengan baik.

Selain untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 beserta perubahannya, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah sebagai legitimasi atas perangkat daerah yang akan dibentuk.

Manggar, April 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Bab I. Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 2 |
| C. Tujuan | 2 |
| D. Metode | 3 |
| | |
| Bab II. Kajian Teoritis dan Empiris | 4 |
| A. Kajian Teoritis | 4 |
| B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma | 6 |
| C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat | 8 |
| D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru | 13 |
| | |
| Bab III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan | 54 |
| | |
| Bab IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis | 69 |
| A. Landasan Filosofis | 69 |
| B. Landasan Sosiologis | 69 |
| C. Landasan Yuridis | 69 |
| | |
| Bab V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah | 72 |
| A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa | 72 |
| B. Arah dan Jangkauan Pengaturan | 72 |
| C. Ruang Lingkup | 73 |
| | |
| Bab VI. Penutup | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |
| | |
| Daftar Pustaka | 76 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi merupakan bagian penting dalam rangka perbaikan manajemen pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang terpusat dengan kondisi geografis yang luas dan penduduk yang banyak dan beranekaragam dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan tingkat bawah untuk melaksanakan urusan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dinamika pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dipandang dari penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, telah berjalan cukup memadai. Konsep ini telah menjadi pilihan kebijakan nasional sebagai upaya menjawab tuntutan masyarakat akan adanya perubahan-perubahan yang terjadi.

Diterbitkannya peraturan tentang pemerintahan daerah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Terkait dengan hal tersebut, salah satu elemen yang perlu dilihat secara mendalam dan komprehensif adalah menyangkut kelembagaan. Oleh karena itu, penataan terhadap kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah.

Penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Untuk itu, Kabupaten Belitung Timur melakukan rancangan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, sebagai dampak dari adanya pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya, dan juga perubahan pola bentuk kedinasan dan badan berdasarkan beban kerja masing-masing serta pengklasifikasian perangkat daerah untuk mengakomodir perubahan dinamika yang terjadi. Oleh karena itu, perlu disusun rancangan peraturan daerah yang mengatur penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil pemetaan urusan pemerintahan, fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan terbaru?
2. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, apakah perlu dilakukan penataan ulang terhadap susunan perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah?
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah?

C. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. melakukan pemetaan urusan pemerintahan, fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan;
2. melakukan kajian atas susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Timur terhadap hasil pemetaan urusan pemerintahan, fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah; dan
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Bambang Sunggono¹, pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Penelitian dilakukan dengan lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap faktor-faktor teknis pembentukan organisasi perangkat daerah.

Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap beban kerja utama urusan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemerintahan dan perangkat daerah dipetakan ke dalam variabel-variabel teknis. Setiap variabel teknis berdasarkan urusan K/L masing-masing urusan pemerintahan di ukur dengan memberikan skala interval dan bobot tertentu. Dengan memasukkan data ke dalam interval yang sesuai, maka akan diketahui bobot tiap indikator teknis dari variabel tersebut. Ada dua jenis sumber data berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, atau disebut juga sebagai data tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian, atau disebut juga data tangan kedua.

Data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis penghitungan dengan menggunakan kriteria tipologi perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, mencakup indikator sebagai berikut:

- a. kriteria tipologi perangkat Daerah untuk menentukan tipe perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:
 - 1) umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - 2) teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
- b. kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:
 - 1) jumlah penduduk;
 - 2) luas wilayah; dan
 - 3) jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- c. kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

¹ Bambang Sunggono, (2003) Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja. Hal.32

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Landasan teoretis adalah landasan untuk mengidentifikasi teori-teori hukum umum maupun khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma hukum dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian.

Pada bagian kajian teoritis ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang digunakan untuk membahas masalah, dan dapat mengidentifikasi asas-asas hukum, teori-teori hukum serta konsep hukum yang digunakan untuk membahas masalah penyusunan Raperda.

Teori perundang-undangan menurut A. Hamid S. Attamimi², berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal mendasar. Oleh sebab itu, dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Implementasi peraturan daerah terdapat pada pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Frasa "dibagi atas" ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur wewenangnya. Sehingga hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi mengatur. Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang "asas legalitas" (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah.

² Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undang Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, hal. 14-15

Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori penjenjangan norma. Teori penjenjangan norma (*stufenbau des rechts*) menurut Hans Kelsen³, bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*). Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan dibawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan diatas Peraturan Daerah Kabupaten pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

Apabila dikaitkan dengan negara hukum, Indonesia memiliki struktur hierarki tata hukum sebagai sebagai berikut:

1. *Staat fundamental norm* (norma fundamental negara): Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/aturan pokok negara): batang tubuh UUD 1945 ,Tap MPR, dan konvensi ketatanegaraan;
3. *Formell gesetz* (aturan “formal”): Undang -Undang; dan
4. *Vorordnungen autonome satzung* (aturan pelaksana/aturan otonom): secara hierarki mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan Bupati dan Walikota.

³ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, hal. 25

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.

Tabel 1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasan)

| Pasal 5 UU No.12 / 2011 | Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011 |
|---|--|
| Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: | |
| a. Kejelasan tujuan | bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. |
| b. Kelembagaan yang tepat | bahwa setiap jenis PPU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPU yang berwenang. PPU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. |
| c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan | bahwa dalam Pembentukan PPU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU. |
| d. dapat dilaksanakan | bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. |
| e. kedayagunaan dan kehasilgunaan | bahwa setiap PPU dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. |
| f. kejelasan rumusan | bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. |

| Pasal 5 UU No.12 / 2011 | Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011 |
|-------------------------|---|
| g. Keterbukaan | bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU. |

Asas-asas sebagaimana dijelaskan di atas, apabila diaplikasikan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. kejelasan tujuan;
Tujuan dari rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai pengaturan nomenklatur, tipologi dan pembagian urusan pemerintahan yang diselenggarakan masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Belitung Timur.
2. kelembagaan yang tepat;
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibentuk bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Belitung Timur.
3. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini sifatnya adalah pengaturan (*regelling*) dengan ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sehingga sudah sesuai antara jenis, hierarki dan materi muatannya.
4. dapat dilaksanakan;
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dilaksanakan sebagai keabsahan perangkat daerah di Kabupaten Belitung Timur.
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini diperlukan sebagai panduan dalam pembagian urusan pemerintahan agar dapat diselenggarakan secara tepat dan efektif serta tidak tumpang tindih.
6. kejelasan rumusan;
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi misinterpretasi maupun bias dalam pelaksanaannya nanti.

7. keterbukaan.

Proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka sehingga setiap pihak yang berkepentingan di dalamnya dapat memberikan saran dan masukan dalam penyusunan

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, terdapat 32 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 17 Dinas, 5 Badan dan 7 Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Klasifikasi perangkat daerah berdasarkan beban kerja dihitung berdasarkan indikator teknis masing-masing urusan pemerintahan dan fungsi penunjang pemerintahan sesuai dengan acuan dari PP Nomor 18 Tahun 2016. Susunan Perangkat Daerah serta eselon jabatan struktural disesuaikan dengan tipe instansi pemerintah hasil dari skoring urusan yang diampu dan diatur pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur beserta perubahannya. Adapun tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Perangkat Daerah | Tipologi |
|-----|---|----------|
| 1. | Sekretariat Daerah | A |
| 2. | Sekretariat DPRD | C |
| 3. | Inspektorat | B |
| 4. | Dinas Pendidikan | A |
| 5. | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | A |
| 6. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | A |
| 7. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | A |

| No. | Nama Perangkat Daerah | Tipologi |
|-----|---|----------|
| 8. | Dinas Lingkungan Hidup | A |
| 9. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | A |
| 10. | Dinas Pertanian dan Pangan | A |
| 11. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | A |
| 12. | Satuan Polisi Pamong Praja | B |
| 13. | Dinas Perhubungan | B |
| 14. | Dinas Komunikasi dan Informatika | B |
| 15. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | B |
| 16. | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | B |
| 17. | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan | B |
| 18. | Dinas Perikanan | B |
| 19. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | C |
| 20. | Dinas Perpustakaan | C |
| 21. | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | A |
| 22. | Badan Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah | A |
| 23. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | B |
| 24. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - |
| 25. | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | - |
| 26. | Damar | A |
| 27. | Dendang | A |
| 28. | Gantung | A |
| 29. | Kelapa Kampit | A |
| 30. | Manggar | A |
| 31. | Simpang Pesak | A |
| 32. | Simpang Renggiang | A |

Selain tipologi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada tabel di atas, berikut spesifikasi urusan pemerintahan beserta pejabat eselon pada masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan data dari BKPSDM per Desember Tahun 2020:

| No | Perangkat Daerah | Urusan Pemerintahan | Eselon | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|------|------|----|
| | | | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IV |
| 1. | Dinas Pendidikan | Pendidikan | | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 2. | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Kesehatan | | 1 | 1 | 5 | 17 |
| | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | |
| 3. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 1 | 1 | 3 | 14 |
| | | Pertanahan | | | | | |
| 4. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 5. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Sosial | | 1 | 1 | 5 | 15 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | |
| | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | |
| 6. | Satuan Polisi Pamong Praja | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Suburusan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 7. | Dinas Perhubungan | Perhubungan | | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 8. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Kepemudaan dan Olahraga | | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 9. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Komunikasi dan Informatika | | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | | Statistik | | | | | |
| | | Persandian | | | | | |
| 10. | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan | Penanaman Modal | | 1 | 1 | 5 | 17 |
| | | Perindustrian | | | | | |
| | | Perdagangan | | | | | |
| 11. | Dinas Pertanian dan Pangan | Pertanian | | 0 | 1 | 5 | 15 |
| | | Pangan | | | | | |
| 12. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 13. | Dinas Perikanan | Kelautan dan Perikanan | | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 14. | Dinas Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | | 1 | 0 | 2 | 12 |

| No | Perangkat Daerah | Urusan Pemerintahan | Eselon | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|------|------|----|
| | | | Ila | Ilb | IIIa | IIIb | IV |
| 15. | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Tenaga Kerja | | | | | |
| | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 16. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Kebudayaan | | 1 | 1 | 2 | 10 |
| | | Pariwisata | | | | | |
| 17. | Dinas Perpustakaan | Perpustakaan | | 1 | 1 | 2 | 6 |
| | | Kearsipan | | | | | |
| 18. | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Perencanaan | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan | | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 19. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Keuangan | | 0 | 1 | 6 | 13 |
| 20. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 21. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Suburusan Kebakaran | | | 1 | | 3 |
| 22. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | 1 | | 3 |
| 23. | Sekretariat Daerah | | 1 | 6 | 8 | | 23 |
| 24. | Sekretariat DPRD | | | 1 | | 3 | 5 |
| 25. | Inspektorat | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 26. | Kecamatan Damar | | | | 1 | 1 | 6 |
| 27. | Kecamatan Dendang | | | | 1 | 1 | 6 |
| 28. | Kecamatan Kelapa Kampit | | | | 1 | 1 | 7 |
| 29. | Kecamatan Simpang Renggang | | | | 0 | 1 | 7 |
| 30. | Kecamatan Gantung | | | | 1 | 1 | 7 |
| 31. | Kecamatan Manggar | | | | 0 | 0 | 6 |
| 32. | Kecamatan Simpang Pesak | | | | 1 | 0 | 5 |

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada bulan Desember 2020, total jumlah pegawai struktural Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah 413. Berdasarkan kondisi eksisting pejabat struktural sesuai dengan komposisi kebutuhan dan *bezeeting*/ketersediaan pegawai, terdapat kekurangan pejabat struktural sebanyak 64 orang, sebagai berikut:

| Eselon | IIa | | IIb | | IIIa | | IIIb | | IVa | | -/+ |
|--------|-----|---|-----|----|------|----|------|----|-----|-----|-----|
| | K | B | K | B | K | B | K | B | K | B | |
| Jumlah | 1 | 1 | 28 | 25 | 39 | 33 | 86 | 79 | 323 | 275 | -64 |

Keterangan:

K: kebutuhan

B: *bezeeting*/ketersediaan pegawai

Kondisi eksisting masih memberikan beberapa kendala dan permasalahan yang berkaitan dengan penjabaran uraian tugas serta nomenklatur pada beberapa Perangkat Daerah. Permasalahan pertama adalah masih ada nomenklatur Perangkat Daerah yang tidak mencakup seluruh urusan yang diampu. Sebagai contoh, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tidak tercantum dalam nomenklatur dan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan terdapat urusan pemerintahan bidang Perindustrian yang tidak tercantum dalam nomenklatur.

Ketiadaan nama urusan pada nomenklatur mengakibatkan segala aktivitas pada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan urusan tersebut dianggap tidak ada oleh kementerian yang mengampu urusan tersebut. Hal tersebut menyulitkan Perangkat Daerah terkait dalam berkoordinasi dan mendapatkan bantuan seperti DAK dan DABA dari pusat berkaitan dengan urusan pemerintah tersebut. Hal tersebut tentu menjadi kerugian bagi Pemerintah Daerah, karena terdapat urusan yang tidak bisa terfasilitasi secara maksimal.

Penataan kelembagaan selain untuk mewujudkan pemerintahan yang tepat fungsi dan ukuran, juga sebagai wadah untuk mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan dari Kepala Daerah, dengan terpilihnya Kepala Daerah tahun 2021-2024 dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka diperlukan evaluasi terhadap kelembagaan berupa pembentukan lembaga baru, penggabungan dan juga penyempurnaan nomenklatur.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dimulai dengan pemetaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Daerah. Dasar penataan kelembagaan adalah pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemetaan urusan pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas urusan pemerintahan urusan wajib dan potensi urusan pilihan serta beban kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan hasilnya akan digunakan untuk menentukan susunan dan tipe perangkat Daerah, serta sebagai dasar penyusunan perencanaan penganggaran pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah.

1. Variabel Umum

Langkah pertama dalam melakukan pemetaan urusan pemerintahan adalah melakukan penghitungan variabel umum Daerah. Berikut tabel variabel umum Daerah kabupaten/kota dan tabel perhitungan variabel umum Kabupaten Belitung Timur:

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah penduduk (Jiwa) | 126.178 | | 10 | | 40 |
| | a. ≤ 100.000 | | 200 | | 20 | |
| | b. 100.001-200.000 | | 400 | | 40 | |
| | c. 200.001-500.000 | | 600 | | 60 | |
| | d. 500.001-1.000.000 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 1.000.000 | | 1.000 | | 100 | |
| 2 | Luas wilayah (Km ²) | 2.506,91 | | 5 | | 50 |
| | a. ≤ 150 | | 200 | | 10 | |
| | b. 151-300 | | 400 | | 20 | |
| | c. 301-450 | | 600 | | 30 | |
| | d. 451 –600 | | 800 | | 40 | |
| | e. > 600 | | 1.000 | | 50 | |
| 3 | Jumlah APBD (Rp) | 802.624.974.233,04 | | 5 | | 40 |
| | a. ≤ 250.000.000.000 | | 200 | | 10 | |
| | b. 250.000.000.001-500.000.000.000 | | 400 | | 20 | |
| | c. 500.000.000.001-750.000.000.000 | | 600 | | 30 | |
| | d. 750.000.000.001-1.000.000.000.000 | | 800 | | 40 | |
| | e. >1.000.000.000.000 | | 1.000 | | 50 | |
| Jumlah Skor Faktor Umum | | | | | | 130 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 182 |

Dari perhitungan yang dilakukan, diperoleh variabel umum kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 130. Variabel umum ini akan digunakan dalam perhitungan besaran perangkat Daerah seluruh urusan pemerintahan, dengan bobot sebesar 20%.

2. Variabel Teknis Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan

Variabel teknis adalah beban kerja utama masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan perangkat Daerah lainnya. Untuk mengetahui intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan perangkat Daerah tersebut maka dilakukan perhitungan skor variabel teknis, yang telah dirumuskan oleh Kementerian/Lembaga yang berkaitan. Berikut ini adalah matriks data variabel teknis seluruh urusan pemerintahan, penunjang dan pendukung urusan pemerintahan yang diperoleh di lingkungan pemerintah Daerah kabupaten Belitung Timur.

1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|---|-------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat | 76 | | 20 | | 40 |
| | a. ≤ 95 | | 200 | | 40 | |
| | b. 96 -191 | | 400 | | 80 | |
| | c. 192-287 | | 600 | | 120 | |
| | d. 288-383 | | 800 | | 160 | |
| | e. >383 | | 1.000 | | 200 | |
| 2. | Jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar | 25671 | | 45 | | 270 |
| | a. ≤ 10.000 | | 200 | | 90 | |
| | b. 10.001-25.001 | | 400 | | 180 | |
| | c. 25.002-87.002 | | 600 | | 270 | |
| | d. 87.003-116.003 | | 800 | | 360 | |
| | e. >116.003 | | 1.000 | | 450 | |
| 3. | Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar | 15 | | 15 | | 150 |
| | a. ≤ 2 | | 200 | | 30 | |
| | b. 3-5 | | 400 | | 60 | |
| | c. 6-8 | | 600 | | 90 | |
| | d. 9-11 | | 800 | | 120 | |
| | e. >11 | | 1.000 | | 150 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 460 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 590 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 826 |

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

| No | Indikator & Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|----------------------------|---------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah penduduk | 126.178 | | 70 | | 420 |
| | a. ≤ 25.000 | | 200 | | 140 | |
| | b. 25.001-50.000 | | 400 | | 280 | |
| | c. 50.001-250.000 | | 600 | | 420 | |

| No | Indikator & Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|----------------------------|-------|-------------|-----------|------|------------|
| | d. 250.001-1.500.000 | | 800 | | 560 | |
| | e. > 1.500.000 | | 1.000 | | 700 | |
| 2 | Jumlah kepadatan penduduk | 50,33 | | 10 | | 100 |
| | a. > 550 | | 200 | | 20 | |
| | b. 401-550 | | 400 | | 40 | |
| | c. 251-400 | | 600 | | 60 | |
| | d. 51-250 | | 800 | | 80 | |
| | e. ≤ 50 | | 1.000 | | 100 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 520 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 650 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 910 |

3. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|---|--------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti | 42.649 | | 50 | | 500 |
| | a. ≤ 6.000 | | 200 | | 100 | |
| | b. 6.001-12.000 | | 400 | | 200 | |
| | c. 12.001-18.000 | | 600 | | 300 | |
| | d. 18.001-24.000 | | 800 | | 400 | |
| | e. > 24.000 | | 1.000 | | 500 | |
| 2 | Jumlah fakir miskin dalam kabupaten/kota | 28.029 | | 15 | | 60 |
| | a. ≤ 10.000 | | 200 | | 30 | |
| | b. 10.001-50.000 | | 400 | | 60 | |
| | c. 50.001-450.000 | | 600 | | 90 | |
| | d. 450.001-600.000 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 600.000 | | 1.000 | | 150 | |
| 3 | Jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil | 0 | | 3 | | 0 |
| | a. ≤ 100 | | 200 | | 6 | |
| | b. 101-200 | | 400 | | 12 | |
| | c. 201-300 | | 600 | | 18 | |
| | d. 301-400 | | 800 | | 24 | |
| | e. > 400 | | 1.000 | | 30 | |
| 4 | Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota | 1.414 | | 12 | | 72 |
| | a. ≤ 500 | | 200 | | 24 | |
| | b. 501-1.000 | | 400 | | 48 | |
| | c. 1.001-1.500 | | 600 | | 72 | |
| | d. 1.501-2.000 | | 800 | | 96 | |
| | e. > 2.000 | | 1.000 | | 120 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 632 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 762 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 1067 |

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|--|--------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah bangunan gedung yang ada di wilayah kabupaten/ kota | 42.100 | | 2 | | 20 |
| | a. ≤ 10.000 | | 200 | | 4 | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|--|-----------|-------------|-----------|------|------------|
| | b. 10.001-20.000 | | 400 | | 8 | |
| | c. 20.001-30.000 | | 600 | | 12 | |
| | d. 30.001-40.000 | | 800 | | 16 | |
| | e. >40.000 | | 1.000 | | 20 | |
| 2 | Panjang sungai dalam satu kabupaten/ kota (Km) | 2.278,7 | | 6 | | 60 |
| | a. ≤ 50 | | 200 | | 12 | |
| | b. 51-100 | | 400 | | 24 | |
| | c. 101 -150 | | 600 | | 36 | |
| | d. 151 -200 | | 800 | | 48 | |
| | e. > 200 | | 1.000 | | 60 | |
| 3 | Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya) yang dikelola kabupaten/ kota (ribu m ³) | 2.631,563 | | 2 | | 20 |
| | a. ≤ 180 | | 200 | | 4 | |
| | b. 181-370 | | 400 | | 8 | |
| | c. 371-560 | | 600 | | 12 | |
| | d. 561-740 | | 800 | | 16 | |
| | e. >740 | | 1.000 | | 20 | |
| 4 | Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten/ kota yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km) | 19,07 | | 3 | | 6 |
| | a. ≤ 270 | | 200 | | 6 | |
| | b. 271-550 | | 400 | | 12 | |
| | c. 551-830 | | 600 | | 18 | |
| | d. 831- 1.100 | | 800 | | 24 | |
| | e. >1.100 | | 1.000 | | 30 | |
| 5 | Total luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya kurang dari 1000 hektar (Ha) | 1.021,09 | | 2 | | 4 |
| | a. ≤ 2.000 | | 200 | | 4 | |
| | b. 2.001-4.000 | | 400 | | 8 | |
| | c. 4.001-6.000 | | 600 | | 12 | |
| | d. 6.001-8.000 | | 800 | | 16 | |
| | e. > 8.000 | | 1.000 | | 20 | |
| 6 | Jumlah desa/ kelurahan yang rawan air | 2 | | 5 | | 10 |
| | a. ≤ 150 | | 200 | | 10 | |
| | b. 151-300 | | 400 | | 20 | |
| | c. 301-450 | | 600 | | 30 | |
| | d. 451-600 | | 800 | | 40 | |
| | e. >600 | | 1.000 | | 50 | |
| 7 | Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah | 397 | | 2 | | 16 |
| | a. ≤ 100 | | 200 | | 4 | |
| | b. 101-200 | | 400 | | 8 | |
| | c. 201-300 | | 600 | | 12 | |
| | d. 301-400 | | 800 | | 16 | |
| | e. > 400 | | 1.000 | | 20 | |
| 8 | Luas cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha) | 14,9 | | 3 | | 6 |
| | a. ≤ 1.000 | | 200 | | 6 | |
| | b. 1.001-2.000 | | 400 | | 12 | |
| | c. 2.001-3.000 | | 600 | | 18 | |
| | d. 3.001-4.000 | | 800 | | 24 | |
| | e. > 4.000 | | 1.000 | | 30 | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|--|-----------|-------------|-----------|------|------------|
| 9 | Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Km) | 31,18 | | 3 | | 6 |
| | a. ≤ 120 | | 200 | | 6 | |
| | b. 121-240 | | 400 | | 12 | |
| | c. 241- 360 | | 600 | | 18 | |
| | d. 361-480 | | 800 | | 24 | |
| | e. > 480 | | 1.000 | | 30 | |
| 10 | Jumlah luas kawasan permukiman (Ha) | 14.802 | | 2 | | 4 |
| | a. ≤ 16.000 | | 200 | | 4 | |
| | b. 16.001-32.000 | | 400 | | 8 | |
| | c. 32.001-48.000 | | 600 | | 12 | |
| | d. 48.001-64.000 | | 800 | | 16 | |
| | e. > 64.000 | | 1.000 | | 20 | |
| 11 | Panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan keputusan Bupati/ Walikota tentang fungsi dan status jalan (Km) | 480,88 | | 30 | | 180 |
| | a. ≤ 200 | | 200 | | 60 | |
| | b. 201-400 | | 400 | | 120 | |
| | c. 401-600 | | 600 | | 180 | |
| | d. 601-800 | | 800 | | 240 | |
| | e. > 800 | | 1.000 | | 300 | |
| 12 | Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun dalam lima tahun terakhir | 35.6 | | 2 | | 4 |
| | a. ≤ 590 | | 200 | | 4 | |
| | b. 591-1.100 | | 400 | | 8 | |
| | c. 1.101-1.700 | | 600 | | 12 | |
| | d. 1.701-2.300 | | 800 | | 16 | |
| | e. > 2.300 | | 1.000 | | 20 | |
| 13 | Rata-rata pengajuan IMB pertahun dalam lima tahun terakhir | 219 | | 3 | | 6 |
| | a. ≤ 5.000 | | 200 | | 6 | |
| | b. 5.001-10.000 | | 400 | | 12 | |
| | c. 10.001-15.000 | | 600 | | 18 | |
| | d. 15.001-20.000 | | 800 | | 24 | |
| | e. > 20.000 | | 1.000 | | 30 | |
| 14 | Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang harus disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota (Ha) | 50.072,51 | | 3 | | 30 |
| | a. ≤ 900 | | 200 | | 6 | |
| | b. 901-1.800 | | 400 | | 12 | |
| | c. 1.801-2.700 | | 600 | | 18 | |
| | d. 2.701-3.600 | | 800 | | 24 | |
| | e. > 3.600 | | 1.000 | | 30 | |
| 15 | Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RTRW kabupaten/kota | 5 | | 2 | | 12 |
| | a. ≤ 2 | | 200 | | 4 | |
| | b. 3-4 | | 400 | | 8 | |
| | c. 5-6 | | 600 | | 12 | |
| | d. 7-8 | | 800 | | 16 | |
| | e. > 8 | | 1.000 | | 20 | |
| 16 | Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah kabupaten/kota (Ha) | 3.042 | | 3 | | 24 |
| | a. ≤ 1.000 | | 200 | | 6 | |
| | b. 1.001-2.000 | | 400 | | 12 | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|---|---------|-------------|-----------|------|------------|
| | c. 2.001-3.000 | | 600 | | 18 | |
| | d. 3.001-4.000 | | 800 | | 24 | |
| | e. > 4.000 | | 1.000 | | 30 | |
| 17 | Presentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen) | 77,44 | | 3 | | 24 |
| | a. ≤ 20 | | 200 | | 6 | |
| | b. 21-40 | | 400 | | 12 | |
| | c. 41-60 | | 600 | | 18 | |
| | d. 61-80 | | 800 | | 24 | |
| | e. > 80 | | 1.000 | | 30 | |
| 18 | Luas kawasan budidaya di kabupaten/kota (Ha) | 213.242 | | 4 | | 24 |
| | a. ≤ 90.000 | | 200 | | 8 | |
| | b. 90.001-180.000 | | 400 | | 16 | |
| | c. 180.001-300.000 | | 600 | | 24 | |
| | d. 300.001 –350.000 | | 800 | | 32 | |
| | e. > 350.000 | | 1.000 | | 40 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 456 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 586 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 820.4 |

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|---|------------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir | 101 | | 5 | | 50 |
| | a. ≤ 5 | tahun 2020 | 200 | | 10 | |
| | b. 6-10 | | 400 | | 20 | |
| | c. 11-15 | | 600 | | 30 | |
| | d. 16-20 | | 800 | | 40 | |
| | e. >20 | | 1.000 | | 50 | |
| 2 | Jumlah unit bangunan gedung yang memiliki SKBG | 0 | | 5 | | 0 |
| | a. ≤ 2 | | 200 | | 10 | |
| | b. 3-10 | | 400 | | 20 | |
| | c. 11-50 | | 600 | | 30 | |
| | d. 51-100 | | 800 | | 40 | |
| | e. >100 | | 1.000 | | 50 | |
| 3 | Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Ha) | 3,49 | | 10 | | 20 |
| | a. ≤ 100 | | 200 | | 20 | |
| | b. 101-500 | | 400 | | 40 | |
| | c. 501-1.000 | | 600 | | 60 | |
| | d. 1.001- 2.000 | | 800 | | 80 | |
| | e. >2.000 | | 1.000 | | 100 | |
| 4 | Jumlah total luas perumahan (Ha) | 3.491,38 | | 39 | | 78 |
| | a. ≤ 50.000 | | 200 | | 78 | |
| | b. 50.001-100.000 | | 400 | | 156 | |
| | c. 100.001-150.000 | | 600 | | 234 | |
| | d. 150.001-200.000 | | 800 | | 312 | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-----------|------|------------|
| | e. > 200.000 | | 1.000 | | 390 | |
| 5 | Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir | 0 | | 1 | | 0 |
| | a. ≤ 150 | | 200 | | 2 | |
| | b. 151-300 | | 400 | | 4 | |
| | c. 301-450 | | 600 | | 6 | |
| | d. 451-600 | | 800 | | 8 | |
| | e. > 600 | | 1.000 | | 10 | |
| 6 | Indeks resiko bencana kabupaten/ kota | 168,4 | | 5 | | 40 |
| | a. ≤ 50 | | 200 | | 10 | |
| | b. 51-100 | | 400 | | 20 | |
| | c. 101-150 | | 600 | | 30 | |
| | d. 151-200 | | 800 | | 40 | |
| | e. >200 | | 1.000 | | 50 | |
| 7 | Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan rencana tata ruang | 0 | | 5 | | 0 |
| | a. ≤ 120 | | 200 | | 10 | |
| | b. 121-240 | | 400 | | 20 | |
| | c. 241-360 | | 600 | | 30 | |
| | d. 361-480 | | 800 | | 40 | |
| | e. > 480 | | 1.000 | | 50 | |
| 8 | Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi | 0 | | 5 | | 0 |
| | a. ≤ 40 | semua kawasan bangunan status rendah | 200 | | 10 | |
| | b. 41-80 | | 400 | | 20 | |
| | c. 81-160 | | 600 | | 30 | |
| | d. 161-240 | | 800 | | 40 | |
| | e. >240 | | 1.000 | | 50 | |
| 9 | Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota | 3 | | 5 | | 10 |
| | a. ≤ 5 | | 200 | | 10 | |
| | b. 6-8 | | 400 | | 20 | |
| | c. 9-10 | | 600 | | 30 | |
| | d. 11-14 | | 800 | | 40 | |
| | e. >14 | | 1.000 | | 50 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 198 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 328 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 459.2 |

6. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Suburusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|--|------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah seluruh Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku | 97 | | 30 | | 300 |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|-------|-------------|-----------|------|------------|
| | a. ≤ 10 | | 200 | | 60 | |
| | b. 11-30 | | 400 | | 120 | |
| | c. 31-60 | | 600 | | 180 | |
| | d. 61-90 | | 800 | | 240 | |
| | e. > 90 | | 1.000 | | 300 | |
| 2 | Jumlah seluruh Peraturan Bupati/Walikota yang masih berlaku | | | 5 | | 50 |
| | a. ≤ 40 | | 200 | | 10 | |
| | b. 41-80 | 419 | 400 | | 20 | |
| | c. 81-120 | | 600 | | 30 | |
| | d. 121-160 | | 800 | | 40 | |
| e. >160 | | 1.000 | 50 | | | |
| 3 | Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP kabupaten/kota | 138 | | 15 | | 30 |
| | a. ≤ 17.946 | | 200 | | 30 | |
| | b. 17.947-35.892 | | 400 | | 60 | |
| | c. 35.893-53.839 | | 600 | | 90 | |
| | d. 53.840-71.785 | | 800 | | 120 | |
| e. > 71.785 | | 1.000 | 150 | | | |
| 4 | Jumlah aset statis pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sasaran pengamanan | 103 | | 15 | | 150 |
| | a. ≤ 10 | | 200 | | 30 | |
| | b. 11-30 | | 400 | | 60 | |
| | c. 31-50 | | 600 | | 90 | |
| | d. 51-70 | | 800 | | 120 | |
| e. >70 | | 1.000 | 150 | | | |
| 5 | Jumlah rata-rata per tahun kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir | 65 | | 15 | | 150 |
| | a. ≤ 5 | | 200 | | 30 | |
| | b. 6-10 | | 400 | | 60 | |
| | c. 11-15 | | 600 | | 90 | |
| | d. 16-20 | | 800 | | 120 | |
| e. > 20 | | 1.000 | 150 | | | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 680 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 810 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 1134 |

b. Suburusan Kebakaran

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|------------|---|-------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah petugas pemadam kebakaran, berdasarkan rasio petugas dengan jumlah penduduk 1:5000 | 25 | | 30 | | 60 |
| | a. ≤ 50 | | 200 | | 60 | |
| | b. 51-100 | | 400 | | 120 | |
| | c. 101-150 | | 600 | | 180 | |
| | d. 151-250 | | 800 | | 240 | |
| e. > 250 | | 1.000 | 300 | | | |
| 2 | Jumlah wilayah manajemen kebakaran dalam kabupaten/kota | 7 | | 30 | | 180 |
| | a. ≤ 3 | | 200 | | 60 | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|------|-------------|-----------|------|------------|
| | b. 4-6 | | 400 | | 120 | |
| | c. 7-9 | | 600 | | 180 | |
| | d. 10-12 | | 800 | | 240 | |
| | e. > 12 | | 1.000 | | 300 | |
| 3 | Jumlah anggota Linmas dalam wilayah kabupaten/kota | 390 | | 20 | | 40 |
| | a. ≤ 2.500 | | 200 | | 40 | |
| | b. 2.501-5.000 | | 400 | | 80 | |
| | c. 5.001-10.000 | | 600 | | 120 | |
| | d. 10.001-25.000 | | 800 | | 160 | |
| | e. > 25.000 | | 1.000 | | 200 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 280 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 410 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| | | | | | | 574 |

7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|---|--------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dalam kabupaten/kota (jiwa) | 70.103 | | 50 | | 200 |
| | a. ≤ 50.000 | | 200 | | 100 | |
| | b. 50.001 - 150.000 | | 400 | | 200 | |
| | c. 150.001-500.000 | | 600 | | 300 | |
| | d. 500.001-1.000.000 | | 800 | | 400 | |
| | e. >1.000.000 | | 1.000 | | 500 | |
| 2 | Jumlah perusahaan mikro/kecil | 12.410 | | 30 | | 120 |
| | a. ≤ 10.000 | | 200 | | 60 | |
| | b. 10.001-30.000 | | 400 | | 120 | |
| | c. 30.001-50.000 | | 600 | | 180 | |
| | d. 50.001-70.000 | | 800 | | 240 | |
| | e. > 70.000 | | 1.000 | | 300 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 320 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 450 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 630 |

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|---|-------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Indeks pembangunan gender kabupaten/kota | 86,17 | | 25 | | 250 |
| | a. ≤57 | 86,08 | 200 | | 50 | |
| | b. 58-65 | | 400 | | 100 | |
| | c. 66-70 | | 600 | | 150 | |
| | d. 71-75 | | 800 | | 200 | |
| | e. >75 | | 1.000 | | 250 | |
| 2 | Jumlah organisasi perempuan dan anak di tingkat Daerah kabupaten/kota | 10 | | 20 | | 80 |
| | a. ≤ 9 | 8 | 200 | | 40 | |
| | b. 10-20 | | 400 | | 80 | |
| | c. 21-40 | | 600 | | 120 | |
| | d. 41-80 | | 800 | | 160 | |
| | e. > 80 | | 1.000 | | 200 | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|------|-------------|-----------|------|------------|
| 3 | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Daerah kabupaten/kota | 4 | | 15 | | 60 |
| | a. ≤ 3 | | 200 | | 30 | |
| | b. 4-6 | | 400 | | 60 | |
| | c. 7-15 | | 600 | | 90 | |
| | d. 16-30 | | 800 | | 120 | |
| | e. >30 | | 1.000 | | 150 | |
| 4 | Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas di tingkat Daerah kabupaten/kota | 2,36 | | 10 | | 40 |
| | a. ≤ 1 | | 200 | | 20 | |
| | b. 2 -3 | | 400 | | 40 | |
| | c. 4-5 | | 600 | | 60 | |
| | d. 6-7 | | 800 | | 80 | |
| | e. >7 | | 1.000 | | 100 | |
| 5 | Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat Daerah kabupaten/kota | 0,25 | | 10 | | 20 |
| | a. ≤ 2 | | 200 | | 20 | |
| | b. 3-4 | | 400 | | 40 | |
| | c. 5-6 | | 600 | | 60 | |
| | d. 7-8 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 8 | | 1.000 | | 100 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 450 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 580 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 812 |

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|---|-------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota x 0,62 kg/kapita/tahun (ton) | 78,11 | | 40 | | 160 |
| | a. ≤ 60 | | 200 | | 80 | |
| | b. 61 - 240 | | 400 | | 160 | |
| | c. 241 - 480 | | 600 | | 240 | |
| | d. 481 - 1.800 | | 800 | | 320 | |
| | e. > 1.800 | | 1.000 | | 400 | |
| 2 | Jumlah desa/kelurahan | 39 | | 10 | | 20 |
| | a. ≤ 75 | | 200 | | 20 | |
| | b. 76 - 150 | | 400 | | 40 | |
| | c. 151 - 225 | | 600 | | 60 | |
| | d. 226 - 300 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 300 | | 1.000 | | 100 | |
| 3 | Persentase penduduk rawan pangan kabupaten/kota | 0,67 | | 30 | | 60 |
| | a. $\leq 5\%$ | | 200 | | 60 | |
| | b. 6% - 9% | | 400 | | 120 | |
| | c. 10% - 12% | | 600 | | 180 | |
| | d. 13% - 15% | | 800 | | 240 | |
| | e. $> 15\%$ | | 1.000 | | 300 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 240 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 370 |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|------------------------------|------|-------------|-----------|------|------------|
| | Pengali | | | | | 1.4 |
| | Jumlah Skor | | | | | 518 |

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|---|--------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan per tahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar | 1.8 | | 35 | | 70 |
| | a. ≤ 50 | | 200 | | 70 | |
| | b. 51-100 | | 400 | | 140 | |
| | c. 101-150 | | 600 | | 210 | |
| | d. 151-200 | | 800 | | 280 | |
| | e. > 200 | | 1.000 | | 350 | |
| 2 | Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota (Ha) | 488,42 | | 25 | | 250 |
| | a. ≤ 75 | | 200 | | 50 | |
| | b. 76-150 | | 400 | | 100 | |
| | c. 151-220 | | 600 | | 150 | |
| | d. 221-300 | | 800 | | 200 | |
| | e. >300 | | 1.000 | | 250 | |
| 3 | Jumlah subjek hak ulayat dalam satu kabupaten/kota | 0 | | 20 | | 0 |
| | a. ≤ 80 | | 200 | | 40 | |
| | b. 81-160 | | 400 | | 80 | |
| | c. 161-240 | | 600 | | 120 | |
| | d. 241-320 | | 800 | | 160 | |
| | e. > 320 | | 1.000 | | 200 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 320 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 450 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 630 |

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Skor Hasil |
|----|--|------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah usaha/ kegiatan penghasil limbah B3 | 39 | | 15 | | 60 |
| | a. ≤ 10 | | 200 | | 30 | |
| | b. 11-50 | | 400 | | 60 | |
| | c. 51-120 | | 600 | | 90 | |
| | d. 121-200 | | 800 | | 120 | |
| | e. >200 | | 1.000 | | 150 | |
| 2 | Jumlah TPS | 44 | | 15 | | 60 |
| | a. ≤ 30 | | 200 | | 30 | |
| | b. 31-60 | | 400 | | 60 | |
| | c. 61-90 | | 600 | | 90 | |
| | d. 91-120 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 120 | | 1.000 | | 150 | |
| 3 | Jumlah bank sampah | 7 | | 15 | | 30 |
| | a. ≤ 15 | | 200 | | 30 | |
| | b. 16-30 | | 400 | | 60 | |
| | c. 31-45 | | 600 | | 90 | |
| | d. 46-60 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 60 | | 1.000 | | 150 | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Skor Hasil |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------|-----------|------|------------|
| 4 | Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL) yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota | 575 | | 20 | | 200 |
| | a. ≤ 10 | | 200 | | 40 | |
| | b. 11-30 | amdal: 22 | 400 | | 80 | |
| | c. 31-50 | ukl/upl: 239 | 600 | | 120 | |
| | d. 51-100 | SPPL THN 2020: 314 | 800 | | 160 | |
| | e. > 100 | | 1.000 | | 200 | |
| 5 | Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu kabupaten/kota | 160 | | 15 | | 150 |
| | a. ≤ 5 | | 200 | | 30 | |
| | b. 6-15 | | 400 | | 60 | |
| | c. 16-20 | | 600 | | 90 | |
| | d. 21-25 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 25 | | 1.000 | | 150 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 500 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 630 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 882 |

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|--|-------------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah penduduk (jiwa) | 126.178 | | 35 | | 210 |
| | a. ≤ 50.000 | | 200 | | 70 | |
| | b. 50.001-75.000 | | 400 | | 140 | |
| | c. 75.001-200.000 | | 600 | | 210 | |
| | d. 200.001-700.000 | | 800 | | 280 | |
| | e. > 700.000 | | 1.000 | | 350 | |
| 2 | Jumlah kecamatan atau nama lain | 7 | | 5 | | 20 |
| | a. ≤ 4 | | 200 | | 10 | |
| | b. 5-9 | | 400 | | 20 | |
| | c. 10-15 | | 600 | | 30 | |
| | d. 16-25 | | 800 | | 40 | |
| | e. >25 | | 1.000 | | 50 | |
| 3 | Jumlah kelurahan/desa atau nama lain | 39 | | 10 | | 60 |
| | a. ≤ 10 | | 200 | | 20 | |
| | b. 11-20 | | 400 | | 40 | |
| | c. 21-50 | | 600 | | 60 | |
| | d. 51-100 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 100 | | 1.000 | | 100 | |
| 4 | Jumlah rata-rata mobiltas penduduk per tahun dalam tiga tahun terakhir | Kepindahan: | | 15 | | 90 |
| | a. ≤ 500 | 1.257 | 200 | | 30 | |
| | b. 501-1.000 | Kedatangan: | 400 | | 60 | |
| | c. 1001-5.000 | 1.724 | 600 | | 90 | |
| | d. 5001-10.000 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 10.000 | | 1.000 | | 150 | |
| 5 | Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/Km ²) | 50,33 | | 15 | | 150 |
| | a. > 15.000 | | 200 | | 30 | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------|------|------------|
| | b. 5.001-15.000 | | 400 | | 60 | |
| | c. 701-5.000 | | 600 | | 90 | |
| | d. 201-700 | | 800 | | 120 | |
| | e. ≤ 200 | | 1.000 | | 150 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 530 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 660 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 924 |

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|-------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah desa | 39 | | 50 | | 100 |
| | a. ≤ 75 | | 200 | | 100 | |
| | b. 76-150 | | 400 | | 200 | |
| | c. 151-225 | | 600 | | 300 | |
| | d. 226-300 | | 800 | | 400 | |
| | e. >300 | | 1.000 | | 500 | |
| 2 | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) | 40 | | 5 | | 10 |
| | a. ≤ 60 | | 200 | | 10 | |
| | b. 61-120 | | 400 | | 20 | |
| | c. 121-180 | | 600 | | 30 | |
| | d. 181-240 | | 800 | | 40 | |
| | e. > 240 | | 1.000 | | 50 | |
| 3 | Jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan | 0 | | 2 | | 0 |
| | a. ≤ 70 | | 200 | | 4 | |
| | b. 71-140 | | 400 | | 8 | |
| | c. 141-210 | | 600 | | 12 | |
| | d. 211-290 | | 800 | | 16 | |
| | e. > 290 | | 1.000 | | 20 | |
| 4 | Jumlah kerjasama antardesa dalam satu kabupaten/kota | 2 | | 3 | | 6 |
| | a. ≤ 80 | | 200 | | 6 | |
| | b. 81-150 | | 400 | | 12 | |
| | c. 151-250 | | 600 | | 18 | |
| | d. 251-300 | | 800 | | 24 | |
| | e. > 300 | | 1.000 | | 30 | |
| 5 | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kabupaten/kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa | 1.042 | | 20 | | 200 |
| | a. ≤ 200 | | 200 | | 40 | |
| | b. 201-400 | | 400 | | 80 | |
| | c. 401-600 | | 600 | | 120 | |
| | d. 601-800 | | 800 | | 160 | |
| | e. > 800 | | 1.000 | | 200 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 316 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 446 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 624.4 |

14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|--------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah pasangan usia subur | 23.339 | | 15 | | 60 |
| | a. ≤ 10.000 | | 200 | | 30 | |
| | b. 10.001 -25.000 | | 400 | | 60 | |
| | c. 25.001- 500.000 | | 600 | | 90 | |
| | d. 500.001-700.000 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 700.000 | | 1.000 | | 150 | |
| 2 | Jumlah PKB dan PLKB minimal berdasarkan jumlah desa/kelurahan (1 PKB/PLKB : 2 desa dan/atau 1 PKB/ PLKB : 1 kelurahan) | 23 | | 12 | | 24 |
| | a. ≤ 50 | | 200 | | 24 | |
| | b. 51-150 | | 400 | | 48 | |
| | c. 151-300 | | 600 | | 72 | |
| | d. 301-400 | | 800 | | 96 | |
| | e. > 400 | | 1.000 | | 120 | |
| 3 | Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB | 0 | | 12 | | 0 |
| | a. ≤ 5 | | 200 | | 24 | |
| | b. 6-15 | | 400 | | 48 | |
| | c. 16-25 | | 600 | | 72 | |
| | d. 26-30 | | 800 | | 96 | |
| | e. > 30 | | 1.000 | | 120 | |
| 4 | Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS | 129 | | 10 | | 20 |
| | a. ≤ 204 | | 200 | | 20 | |
| | b. 205-404 | | 400 | | 40 | |
| | c. 405-604 | | 600 | | 60 | |
| | d. 605-804 | | 800 | | 80 | |
| | e. >804 | | 1.000 | | 100 | |
| 5 | Jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa | 15 | | 10 | | 20 |
| | a. ≤ 16 | | 200 | | 20 | |
| | b. 17-32 | | 400 | | 40 | |
| | c. 33-48 | | 600 | | 60 | |
| | d. 49-64 | | 800 | | 80 | |
| | e. >64 | | 1.000 | | 100 | |
| 6 | Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 0 | | 9 | | 0 |
| | a. ≤ 5 | | 200 | | 18 | |
| | b. 6-15 | | 400 | | 36 | |
| | c. 16-25 | | 600 | | 54 | |
| | d. 26-30 | | 800 | | 72 | |
| | e. >30 | | 1.000 | | 90 | |
| 7 | Jumlah keluarga | 42.057 | | 12 | | 48 |
| | a. ≤ 25.000 | | 200 | | 24 | |
| | b. 25.001-308.222 | | 400 | | 48 | |
| | c. 308.223 - 406.979 | | 600 | | 72 | |
| | d. 406.980-613.737 | | 800 | | 96 | |
| | e. >613.737 | | 1.000 | | 120 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 172 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 302 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 423 |

15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|---|--------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah rata-rata pertahun dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir | 82 | | 2 | | 20 |
| | a. ≤ 20 | | 200 | | 4 | |
| | b. 21-40 | | 400 | | 8 | |
| | c. 41-60 | | 600 | | 12 | |
| | d. 61-80 | | 800 | | 16 | |
| | e. > 80 | | 1.000 | | 20 | |
| 2 | Panjang jalan kabupaten/kota (Km) | 480,88 | | 5 | | 20 |
| | a. ≤ 460 | | 200 | | 10 | |
| | b. 461-920 | | 400 | | 20 | |
| | c. 921-1.300 | | 600 | | 30 | |
| | d. 1.301-1.800 | | 800 | | 40 | |
| | e. > 1.800 | | 1.000 | | 50 | |
| 3 | Jumlah terminal C | 1 | | 2 | | 4 |
| | a. ≤ 3 | | 200 | | 4 | |
| | b. 4-6 | | 400 | | 8 | |
| | c. 7-9 | | 600 | | 12 | |
| | d. 10-12 | | 800 | | 16 | |
| | e. > 12 | | 1.000 | | 20 | |
| 4 | Jumlah lokasi parkir baik yang dikelola Pemda maupun pihak swasta (unit) | 22 | | 2 | | 4 |
| | a. ≤ 30 | | 200 | | 4 | |
| | b. 31-60 | | 400 | | 8 | |
| | c. 61-90 | | 600 | | 12 | |
| | d. 91-120 | | 800 | | 16 | |
| | e. > 120 | | 1.000 | | 20 | |
| 5 | Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala | 1.300 | | 2 | | 4 |
| | a. ≤ 2.000 | | 200 | | 4 | |
| | b. 2.001-4.000 | | 400 | | 8 | |
| | c. 4.001-6.000 | | 600 | | 12 | |
| | d. 6.001-8.000 | | 800 | | 16 | |
| | e. > 8.000 | | 1.000 | | 20 | |
| 6 | Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit) | 110 | | 2 | | 4 |
| | a. ≤ 300 | | 200 | | 4 | |
| | b. 301-600 | | 400 | | 8 | |
| | c. 601-900 | | 600 | | 12 | |
| | d. 901-1.200 | | 800 | | 16 | |
| | e. > 1.200 | | 1.000 | | 20 | |
| 7 | Jumlah trayek angkutan umum dalam satu Daerah kabupaten/kota | 6 | | 2 | | 4 |
| | a. ≤ 15 | | 200 | | 4 | |
| | b. 16-30 | | 400 | | 8 | |
| | c. 31-45 | | 600 | | 12 | |
| | d. 46-60 | | 800 | | 16 | |
| | e. > 60 | | 1.000 | | 20 | |
| 8 | Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota | 0 | | 15 | | 0 |
| | a. ≤ 250 | | 200 | | 30 | |
| | b. 251-500 | | 400 | | 60 | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|--------------------|--|-------|-------------|-----------|------|------------|
| | c. 501-750 | | 600 | | 90 | |
| | d. 751-1.000 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 1.000 | | 1.000 | | 150 | |
| 9 | Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal | 0 | | 2 | | 0 |
| | a. ≤ 4 | | 200 | | 4 | |
| | b. 5-8 | | 400 | | 8 | |
| | c. 9-12 | | 600 | | 12 | |
| | d. 13-15 | | 800 | | 16 | |
| | e. >15 | | 1.000 | | 20 | |
| 10 | Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota | 0 | | 2 | | 0 |
| | a. ≤ 2 | | 200 | | 4 | |
| | b. 3-4 | | 400 | | 8 | |
| | c. 5-8 | | 600 | | 12 | |
| | d. 9-12 | | 800 | | 16 | |
| | e. > 12 | | 1.000 | | 20 | |
| 11 | Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota | 18 | | 15 | | 90 |
| | a. ≤ 8 | | 200 | | 30 | |
| | b. 9-16 | | 400 | | 60 | |
| | c. 17-24 | | 600 | | 90 | |
| | d. 25-32 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 32 | | 1.000 | | 150 | |
| 12 | Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda kabupaten/kota atau pihak swasta | 1 | | 5 | | 10 |
| | a. ≤ 7 | | 200 | | 10 | |
| | b. 8-15 | | 400 | | 20 | |
| | c. 16 - 24 | | 600 | | 30 | |
| | d. 25 - 32 | | 800 | | 40 | |
| | e. > 32 | | 1.000 | | 50 | |
| 13 | Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut) | 335 | | 15 | | 150 |
| | a. ≤ 40 | | 200 | | 30 | |
| | b. 41-80 | | 400 | | 60 | |
| | c. 81-120 | | 600 | | 90 | |
| | d. 121-160 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 160 | | 1.000 | | 150 | |
| 14 | Jumlah rambu jalan (unit) | 4.846 | | 4 | | 40 |
| | a. ≤ 560 | | 200 | | 8 | |
| | b. 561-1.200 | | 400 | | 16 | |
| | c. 1.201-1.700 | | 600 | | 24 | |
| | d. 1.701-2.200 | | 800 | | 32 | |
| | e. > 2.200 | | 1.000 | | 40 | |
| 15 | Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m) | 5.895 | | 5 | | 20 |
| | a. ≤ 4.800 | | 200 | | 10 | |
| | b. 4.801-9.700 | | 400 | | 20 | |
| | c. 9.701-14.500 | | 600 | | 30 | |
| | d. 14.501-19.500 | | 800 | | 40 | |
| | e. > 19.500 | | 1.000 | | 50 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 370 |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------|------|------------|
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 500 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 700 |

16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|---|-------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah Perangkat Daerah, UPT, dan kelurahan/ desa | 81 | | 23 | | 92 |
| | a. ≤ 30 | | 200 | | 46 | |
| | b. 31-100 | | 400 | | 92 | |
| | c. 101-200 | | 600 | | 138 | |
| | d. 201 –300 | | 800 | | 184 | |
| | e. > 300 | | 1.000 | | 230 | |
| 2 | Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio, website, media sosial) milik Pemda | 25 | | 18 | | 72 |
| | a. ≤ 15 | | 200 | | 36 | |
| | b. 16-45 | | 400 | | 72 | |
| | c. 46-90 | | 600 | | 108 | |
| | d. 91 –150 | | 800 | | 144 | |
| | e. > 150 | | 1.000 | | 180 | |
| 3 | Jumlah aparatur negara di lingkungan pemerintah kabupaten/ kota | 2.786 | | 10 | | 40 |
| | a. ≤ 2.000 | | 200 | | 20 | |
| | b. 2.001- 3.000 | | 400 | | 40 | |
| | c. 3.001- 4.000 | | 600 | | 60 | |
| | d. 4.001-9.000 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 9.000 | | 1.000 | | 100 | |
| 4 | Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio) non pemerintah yang beredar di kabupaten/kota | 8 | | 14 | | 28 |
| | a. ≤ 12 | | 200 | | 28 | |
| | b. 13-39 | | 400 | | 56 | |
| | c. 40-81 | | 600 | | 84 | |
| | d. 82 –138 | | 800 | | 112 | |
| | e. > 138 | | 1.000 | | 140 | |
| 5 | Jumlah layanan publik dan pemerintahan di tingkat Pemerintah kabupaten/kota yang diselenggarakan dengan Sistem <i>Electronic Government</i> | 52 | | 15 | | 120 |
| | a. ≤ 20 | | 200 | | 30 | |
| | b. 21-30 | | 400 | | 60 | |
| | c. 31-50 | | 600 | | 90 | |
| | d. 51 –100 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 100 | | 1.000 | | 150 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 352 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 482 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 674.8 |

17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|---|------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam | 2 | | 10 | | 20 |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|--------|-------------|-----------|------|------------|
| | dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota | | | | | |
| | a. ≤ 90 | | 200 | | 20 | |
| | b. 91-180 | | 400 | | 40 | |
| | c. 181-270 | | 600 | | 60 | |
| | d. 271-360 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 360 | | 1.000 | | 100 | |
| 2 | Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota | 124 | | 10 | | 20 |
| | a. ≤ 1.000 | | 200 | | 20 | |
| | b. 1.001-2.000 | | 400 | | 40 | |
| | c. 2.001-3.000 | | 600 | | 60 | |
| | d. 3.001-4.000 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 4.000 | | 1.000 | | 100 | |
| 3 | Jumlah pelaku usaha mikro | 12.410 | | 20 | | 40 |
| | a. ≤ 14.000 | | 200 | | 40 | |
| | b. 14.001-28.000 | | 400 | | 80 | |
| | c. 28.001-42.000 | | 600 | | 120 | |
| | d. 42.001-56.000 | | 800 | | 160 | |
| | e. > 56.000 | | 1.000 | | 200 | |
| 4 | Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota | 41 | | | | |
| | a. ≤ 150 | | 200 | 20 | 40 | 40 |
| | b. 151-300 | | 400 | | 80 | |
| | c. 301-450 | | 600 | | 120 | |
| | d. 451-600 | | 800 | | 160 | |
| | e. > 600 | | 1.000 | | 200 | |
| 5 | Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota | 124 | | 20 | | 40 |
| | a. ≤ 300 | | 200 | | 40 | |
| | b. 301-600 | | 400 | | 80 | |
| | c. 601-1.000 | | 600 | | 120 | |
| | d. 1.001-1.500 | | 800 | | 160 | |
| | e. > 1.500 | | 1.000 | | 200 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 160 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 290 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 406 |

18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|---|------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam Daerah kabupaten/kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur) | 23 | | 10 | | 40 |
| | a. ≤ 20 | | 200 | | 20 | |
| | b. 21-40 | | 400 | | 40 | |
| | c. 41-80 | | 600 | | 60 | |
| | d. 81-100 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 100 | | 1.000 | | 100 | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|------|-------------|-----------|------|------------|
| 2 | Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kabupaten/kota | 873 | | | | 60 |
| | a. ≤ 2.000 | | 200 | 30 | 60 | |
| | b. 2.001-4.000 | | 400 | | 120 | |
| | c. 4.001-6.000 | | 600 | | 180 | |
| | d. 6.001-8.000 | | 800 | | 240 | |
| | e. > 8.000 | | 1.000 | | 300 | |
| 3 | Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota | 91 | | 40 | | 320 |
| | a. ≤ 20 | | 200 | | 80 | |
| | b. 21-40 | | 400 | | 160 | |
| | c. 41-80 | | 600 | | 240 | |
| | d. 81-100 | | 800 | | 320 | |
| | e. > 100 | | 1.000 | | 400 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 420 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 550 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 770 |

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|--------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirasaha, dan pemuda kader kabupaten/kota | 14.255 | | 35 | | 350 |
| | a. ≤ 400 | | 200 | | 70 | |
| | b. 401-700 | | 400 | | 140 | |
| | c. 701-950 | | 600 | | 210 | |
| | d. 951-1.250 | | 800 | | 280 | |
| | e. > 1.250 | | 1.000 | | 350 | |
| 2 | Jumlah organisasi kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan tingkat kabupaten/kota | 216 | | | | |
| | a. ≤ 120 | | 200 | 20 | 40 | 120 |
| | b. 121-180 | | 400 | | 80 | |
| | c. 181-300 | | 600 | | 120 | |
| | d. 301-370 | | 800 | | 160 | |
| | e. > 370 | | 1.000 | | 200 | |
| 3 | Jumlah kejuaraan/kompetisi olahraga yang diikuti kabupaten/kota | 17 | | 10 | | 20 |
| | a. ≤ 50 | | 200 | | 20 | |
| | b. 51-100 | | 400 | | 40 | |
| | c. 101-150 | | 600 | | 60 | |
| | d. 151-300 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 300 | | 1.000 | | 100 | |
| 4 | Jumlah kejuaraan olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat kabupaten/kota | 51 | | 15 | | 90 |
| | a. ≤ 20 | | 200 | | 30 | |
| | b. 21-40 | | 400 | | 60 | |
| | c. 41-60 | | 600 | | 90 | |
| | d. 61-75 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 75 | | 1.000 | | 150 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 580 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 710 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|-------------|------------------------------|------|-------------|-----------|------|------------|
| Jumlah Skor | | | | | | 994 |

20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS | 2 | | 45 | | 90 |
| | a. ≤ 40 | | 200 | | 90 | |
| | b. 41-80 | | 400 | | 180 | |
| | c. 81-120 | | 600 | | 270 | |
| | d. 121 –160 | | 800 | | 360 | |
| | e. > 160 | | 1.000 | | 450 | |
| 2 | Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS | 2 | | 35 | | 70 |
| | a. ≤ 20 | | 200 | | 70 | |
| | b. 21-30 | | 400 | | 140 | |
| | c. 31-50 | | 600 | | 210 | |
| | d. 51-70 | | 800 | | 280 | |
| | e. > 70 | | 1.000 | | 350 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 160 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 290 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 406 |

21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|---|------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah jenis informasi di tingkat kabupaten/kota yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan | 9 | | 16 | | 64 |
| | a. ≤ 5 | | 200 | | 32 | |
| | b. 6-10 | | 400 | | 64 | |
| | c. 11-15 | | 600 | | 96 | |
| | d. 16-20 | | 800 | | 128 | |
| | e. >20 | | 1.000 | | 160 | |
| 2 | Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian | 51 | | 16 | | 32 |
| | a. ≤ 250 | | 200 | | 32 | |
| | b. 251-500 | | 400 | | 64 | |
| | c. 501-1.000 | | 600 | | 96 | |
| | d. 1.001-1.500 | | 800 | | 128 | |
| | e. >1.500 | | 1.000 | | 160 | |
| 3 | Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat kabupaten/kota yang harus diamankan | 123 | | 16 | | 32 |
| | a. ≤ 200 | | 200 | | 32 | |
| | b. 201-300 | | 400 | | 64 | |
| | c. 301-600 | | 600 | | 96 | |
| | d. 601-900 | | 800 | | 128 | |
| | e. >900 | | 1.000 | | 160 | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|---|------|-------------|-----------|------|------------|
| 4 | Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat kabupaten/kota | | | 16 | | 32 |
| | a. ≤ 100 | 16 | 200 | | 32 | |
| | b. 101-200 | | 400 | | 64 | |
| | c. 201-400 | | 600 | | 96 | |
| | d. 401-500 | | 800 | | 128 | |
| | e. >500 | | 1.000 | | 160 | |
| 5 | Jumlah Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan | 20 | | 16 | | 32 |
| | a. ≤ 50 | | 200 | | 32 | |
| | b. 51-80 | | 400 | | 64 | |
| | c. 81-110 | | 600 | | 96 | |
| | d. 111-140 | | 800 | | 128 | |
| | e. > 140 | | 1.000 | | 160 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 192 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 322 |
| Pengali | | | | | | |
| Jumlah Skor | | | | | | 322 |

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|---|------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kabupaten/kota | 23 | | 10 | | 100 |
| | a. ≤ 5 | | 200 | | 20 | |
| | b. 6-10 | | 400 | | 40 | |
| | c. 11-15 | | 600 | | 60 | |
| | d. 16-20 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 20 | | 1.000 | | 100 | |
| 2 | Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu kabupaten/kota | 172 | | 30 | | 300 |
| | a. ≤ 25 | | 200 | | 60 | |
| | b. 26-50 | | 400 | | 120 | |
| | c. 51-75 | | 600 | | 180 | |
| | d. 76-100 | | 800 | | 240 | |
| | e. >100 | | 1.000 | | 300 | |
| 3 | Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat | 3 | | 10 | | 40 |
| | a. ≤ 1 | | 200 | | 20 | |
| | b. 2-3 | | 400 | | 40 | |
| | c. 4-5 | | 600 | | 60 | |
| | d. 6-7 | | 800 | | 80 | |
| | e. >7 | | 1.000 | | 100 | |
| 4 | Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat kabupaten/kota | 105 | | 30 | | 180 |
| | a. ≤ 50 | | 200 | | 60 | |
| | b. 51-100 | | 400 | | 120 | |
| | c. 101-150 | | 600 | | 180 | |
| | d. 151-200 | | 800 | | 240 | |
| | e. >200 | | 1.000 | | 300 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 620 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 750 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|-------------|------------------------------|------|-------------|-----------|------|------------|
| Jumlah Skor | | | | | | 1050 |

23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik kabupaten/kota | 453 | | 30 | | 60 |
| | a. ≤ 7.000 | (2019) | 200 | | 60 | |
| | b. 7.001-10.000 | | 400 | | 120 | |
| | c. 10.001-40.000 | | 600 | | 180 | |
| | d. 40.001-60.000 | | 800 | | 240 | |
| | e. >60.000 | | 1.000 | | 300 | |
| 2 | Jumlah koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik kabupaten/kota (termasuk satuan pendidikan yang oleh kabupaten/kota) | 207.650 | | 25 | | 250 |
| | a. ≤ 15.000 | | 200 | | 50 | |
| | b. 15.001-50.000 | | 400 | | 100 | |
| | c. 50.001-150.000 | | 600 | | 150 | |
| | d. 150.001-200.000 | | 800 | | 200 | |
| | e. >200.000 | | 1.000 | | 250 | |
| 3 | Jumlah Perpustakaan yang seharusnya dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Khusus) | 155 | | 23 | | 46 |
| | a. ≤ 1.000 | | 200 | | 46 | |
| | b. 1.001-2.000 | | 400 | | 92 | |
| | c. 2.001-3.000 | | 600 | | 138 | |
| | d. 3.001-4.000 | | 800 | | 184 | |
| | e. >4.000 | | 1.000 | | 230 | |
| 4 | Jumlah promosi gemar membaca (dalam satu tahun) yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota | 61 (2019) | | 2 | | 8 |
| | a. ≤ 50 | | 200 | | 4 | |
| | b. 51-100 | | 400 | | 8 | |
| | c. 101-150 | | 600 | | 12 | |
| | d. 151-200 | | 800 | | 16 | |
| | e. >200 | | 1.000 | | 20 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 364 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 494 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 691.6 |

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|---|------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) dan BUMD kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik | 36 | | 25 | | 50 |
| | a. ≤ 60 | | 200 | | 50 | |
| | b. 61-80 | | 400 | | 100 | |
| | c. 81-100 | | 600 | | 150 | |
| | d. 101-120 | | 800 | | 200 | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|---|-------|-------------|-----------|------|------------|
| | e. > 120 | | 1.000 | | 250 | |
| 2 | Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik | 39 | | 15 | | 30 |
| | a. ≤ 100 | | 200 | | 30 | |
| | b. 101-250 | | 400 | | 60 | |
| | c. 251-400 | | 600 | | 90 | |
| | d. 401-550 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 550 | | 1.000 | | 150 | |
| 3 | Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah Perangkat Daerah kabupaten/ kota, BUMD kabupaten/kota, dan Desa/Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks \per tahun) | 1.188 | | 40 | | 320 |
| | a. ≤ 550 | | 200 | | 80 | |
| | b. 551-850 | | 400 | | 160 | |
| | c. 851-1.150 | | 600 | | 240 | |
| | d. 1.151-1.450 | | 800 | | 320 | |
| | e. > 1.450 | | 1.000 | | 400 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 400 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 530 |
| Pengali | | | | | | |
| Jumlah Skor | | | | | | 530 |

25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|---|-------------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah nelayan kecil dalam wilayah kabupaten/kota (jiwa) | 6.602 | | 20 | | 80 |
| | a. ≤ 5.000 | | 200 | | 40 | |
| | b. 5.001-10.000 | | 400 | | 80 | |
| | c. 10.001-15.000 | | 600 | | 120 | |
| | d. 15.001-20.000 | | 800 | | 160 | |
| | e. >20.000 | | 1.000 | | 200 | |
| 2 | Jumlah tempat pelelangan ikan | 1 | | 15 | | 30 |
| | a. ≤ 10 | | 200 | | 30 | |
| | b. 11-20 | | 400 | | 60 | |
| | c. 21-30 | | 600 | | 90 | |
| | d. 31-40 | | 800 | | 120 | |
| | e. >40 | | 1.000 | | 150 | |
| 3 | Jumlah SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu Daerah kabupaten/kota | 322 | | 5 | | 50 |
| | a. ≤ 20 | | 200 | | 10 | |
| | b. 21-40 | | 400 | | 20 | |
| | c. 41-60 | | 600 | | 30 | |
| | d. 61-80 | | 800 | | 40 | |
| | e. >80 | | 1.000 | | 50 | |
| 4 | Luas lahan potensi budidaya ikan (Ha) | 281.345,281 | | 20 | | 200 |
| | a. ≤ 2.000 | | 200 | | 40 | |
| | b. 2.001-5.000 | | 400 | | 80 | |
| | c. 5.001-8.000 | | 600 | | 120 | |
| | d. 8.001-11.000 | | 800 | | 160 | |
| | e. >11.000 | | 1.000 | | 200 | |
| 5 | Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (rumah tangga pembudidaya) | 218 | | 15 | | 60 |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|---------------------------------|-------|-------------|-----------|------|------------|
| | a. ≤ 200 | | 200 | | 30 | |
| | b. 201-500 | | 400 | | 60 | |
| | c. 501-700 | | 600 | | 90 | |
| | d. 701-1.000 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 1.000 | | 1.000 | | 150 | |
| 6 | Jumlah kapal sampai dengan 5 GT | 2.503 | | 5 | | 50 |
| | a. ≤ 50 | | 200 | | 10 | |
| | b. 51-100 | | 400 | | 20 | |
| | c. 101-150 | | 600 | | 30 | |
| | d. 151-200 | | 800 | | 40 | |
| | e. >200 | | 1.000 | | 50 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 470 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 600 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 840 |

26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | 28 | | 20 | | 80 |
| | a. ≤ 20 | | 200 | | 40 | |
| | b. 21-40 | | 400 | | 80 | |
| | c. 41-50 | | 600 | | 120 | |
| | d. 51-70 | | 800 | | 160 | |
| | e. > 70 | | 1.000 | | 200 | |
| 2 | Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing | 23 | | 10 | | 40 |
| | a. ≤ 10 | | 200 | | 20 | |
| | b. 11-30 | | 400 | | 40 | |
| | c. 31-40 | | 600 | | 60 | |
| | d. 41-60 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 60 | | 1.000 | | 100 | |
| 3 | Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata | 71 | | 50 | | 500 |
| | a. ≤ 5 | | 200 | | 100 | |
| | b. 6-10 | | 400 | | 200 | |
| | c. 11-20 | | 600 | | 300 | |
| | d. 21-40 | | 800 | | 400 | |
| | e. > 40 | | 1.000 | | 500 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 620 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 750 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 1050 |

27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|--|-----------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah pengecer/kios sarana pertanian (unit) | 9 | | 8 | | 16 |
| | a. ≤ 25 | | 200 | | 16 | |
| | b. 26 - 50 | | 400 | | 32 | |
| | c. 51- 100 | | 600 | | 48 | |
| | d. 101 - 200 | | 800 | | 64 | |
| | e. > 200 | | 1.000 | | 80 | |
| 2 | Jumlah jenis rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia dalam satu kabupaten/kota (rumpun/galur) | 10 | | 3 | | 30 |
| | a. ≤ 2 | | 200 | | 6 | |
| | b. 3 - 4 | | 400 | | 12 | |
| | c. 5 - 6 | | 600 | | 18 | |
| | d. 7 - 8 | | 800 | | 24 | |
| | e. > 8 | | 1.000 | | 30 | |
| 3 | Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) kabupaten/kota (ton) | 385 | | 4 | | 8 |
| | a. ≤ 1.500 | | 200 | | 8 | |
| | b. 1.501 - 2.000 | | 400 | | 16 | |
| | c. 2.001 - 2.500 | | 600 | | 24 | |
| | d. 2.501 - 3.000 | | 800 | | 32 | |
| | e. > 3.000 | | 1.000 | | 40 | |
| 4 | Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam satu kabupaten/kota (jenis sediaan) | 14 | | 3 | | 24 |
| | a. ≤ 7 | | 200 | | 6 | |
| | b. 8 - 10 | | 400 | | 12 | |
| | c. 11 - 13 | | 600 | | 18 | |
| | d. 14 - 16 | | 800 | | 24 | |
| | e. > 16 | | 1.000 | | 30 | |
| 5 | Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam satu kabupaten/kota (jenis) | 9 | | 3 | | 30 |
| | a. ≤ 2 | | 200 | | 6 | |
| | b. 3 - 4 | | 400 | | 12 | |
| | c. 5-6 | | 600 | | 28 | |
| | d. 7 - 8 | | 800 | | 24 | |
| | e. >8 | | 1.000 | | 30 | |
| 6 | Luas lahan pengembangan pertanian yang dialiri irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di kabupaten/kota (Ha) | 66.691,72 | | 12 | | 120 |
| | a. ≤ 5.000 | | 200 | | 24 | |
| | b. 5.001 - 7.500 | | 400 | | 48 | |
| | c. 7.501 - 10.000 | | 600 | | 72 | |
| | d. 10.001 - 15.000 | | 800 | | 96 | |
| | e. > 15.000 | | 1.000 | | 120 | |
| 7 | Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) (ekor) | 421.469 | | 8 | | 16 |
| | a. ≤ 500.000 | | 200 | | 16 | |
| | b. 500.001 - 1.000.000 | | 400 | | 32 | |
| | c. 1.000.001 - 3.000.000 | | 600 | | // | |
| | d. 3.000.001 - 6.000.000 | | 800 | | 64 | |
| | e. $> 6.000.000$ | | 1.000 | | 80 | |
| 8 | Jumlah rata-rata per bulan keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota | 3 | | 3 | | 6 |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|---------------|---|-------------|-------------|-----------|------|------------|
| | a. ≤ 10 | | 200 | | 6 | |
| | b. 11 - 15 | | 400 | | 12 | |
| | c. 16 - 25 | | 600 | | 18 | |
| | d. 26 - 35 | | 800 | | 24 | |
| | e. > 35 | | 1.000 | | 30 | |
| 9 | Jumlah rata-rata per bulan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di kabupaten/kota (ton) | 71 | | 3 | | 12 |
| | a. ≤ 50 | ket: | 200 | | 6 | |
| | b. 51 - 100 | 635 produk | 400 | | 12 | |
| | c. 101 - 150 | 217,1 hewan | 600 | | 18 | |
| | d. 151 - 200 | | 800 | | 24 | |
| e. > 200 | | 1.000 | 30 | | | |
| 10 | Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota (jenis layanan) | 1 | | 3 | | 6 |
| | a. ≤ 5 | | 200 | | 6 | |
| | b. 6 - 8 | | 400 | | 12 | |
| | c. 9 - 15 | | 600 | | 18 | |
| | d. 16 - 25 | | 800 | | 24 | |
| e. > 25 | | 1.000 | 30 | | | |
| 11 | Jumlah jenis usaha produk hewan (unit usaha) dalam kabupaten/kota | 4 | | 3 | | 6 |
| | a. ≤ 50 | | 200 | | 6 | |
| | b. 51 - 70 | | 400 | | 12 | |
| | c. 71 - 100 | | 600 | | 18 | |
| | d. 101 - 150 | | 800 | | 24 | |
| e. > 150 | | 1.000 | 30 | | | |
| 12 | Jumlah peternak | 548 | | 6 | | 24 |
| | a. ≤ 350 | | 200 | | 12 | |
| | b. 351-1.000 | | 400 | | 24 | |
| | c. 1.001-5.000 | | 600 | | 36 | |
| | d. 5.001-7.500 | | 800 | | 48 | |
| e. >7.500 | | 1.000 | 60 | | | |
| 13 | Luas lahan pertanian di kabupaten/kota (Ha) | 250.676 | | 8 | | 80 |
| | a. ≤ 10.000 | | 200 | | 16 | |
| | b. 10.001 - 20.000 | | 400 | | 32 | |
| | c. 20.001 - 30.000 | | 600 | | 48 | |
| | d. 30.001 - 40.000 | | 800 | | 64 | |
| e. > 40.000 | | 1.000 | 80 | | | |
| 14 | Jumlah jenis penyakit hewan menular di kabupaten/kota | 12 | | 2 | | 20 |
| | a. ≤ 2 | | 200 | | 4 | |
| | b. 3 - 4 | | 400 | | 8 | |
| | c. 5 - 6 | | 600 | | 12 | |
| | d. 7 - 8 | | 800 | | 16 | |
| e. > 8 | | 1.000 | 20 | | | |
| 15 | Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam lima tahun terakhir di kabupaten/kota | 59 | | 8 | | 48 |
| | a. ≤ 20 | | 200 | | 16 | |
| | b. 21 - 40 | | 400 | | 32 | |
| | c. 41 - 100 | | 600 | | 48 | |
| | d. 101 - 200 | | 800 | | 64 | |
| e. > 200 | | 1.000 | 80 | | | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|---|------|-------------|-----------|------|------------|
| 16. | Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam 5 (lima) tahun terakhir di kabupaten/kota | 0 | | 3 | | 0 |
| | a. ≤ 20 | | 200 | | 6 | |
| | b. 21 - 40 | | 400 | | 12 | |
| | c. 41 - 100 | | 600 | | 18 | |
| | d. 101 - 200 | | 800 | | 24 | |
| | e. > 200 | | 1.000 | | 30 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 446 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 576 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 806.4 |

28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|--|-------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku bagi pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan | 434 | | 10 | | 20 |
| | a. ≤ 1.000 | | 200 | | 20 | |
| | b. 1.001-2.500 | | 400 | | 40 | |
| | c. 2.501-10.000 | | 600 | | 60 | |
| | d. 10.001-20.000 | | 800 | | 80 | |
| | e. >20.000 | | 1.000 | | 100 | |
| 2 | Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi | 9 | | 5 | | 10 |
| | a. ≤ 100 | | 200 | | 10 | |
| | b. 101-200 | | 400 | | 20 | |
| | c. 201-300 | | 600 | | 30 | |
| | d. 301-400 | | 800 | | 40 | |
| | e. > 400 | | 1.000 | | 50 | |
| 3 | Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan | 8 | | 5 | | 10 |
| | a. ≤ 100 | | 200 | | 10 | |
| | b. 101-200 | | 400 | | 20 | |
| | c. 201-300 | | 600 | | 30 | |
| | d. 301-400 | | 800 | | 40 | |
| | e. > 400 | | 1.000 | | 50 | |
| 4 | Jumlah UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya) | 1.304 | | 20 | | 80 |
| | a. ≤ 1.000 | | 200 | | 40 | |
| | b. 1.001-5.000 | | 400 | | 80 | |
| | c. 5.001-10.000 | | 600 | | 120 | |
| | d. 10.001-15.000 | | 800 | | 160 | |
| | e. >15.000 | | 1.000 | | 200 | |
| 5 | Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit yang produknya hanya ada di satu kabupaten/kota | 1 | | 10 | | 20 |
| | a. ≤ 10 | | 200 | | 20 | |
| | b. 11-30 | | 400 | | 40 | |
| | c. 31-40 | | 600 | | 60 | |
| | d. 41-50 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 50 | | 1.000 | | 100 | |
| 6 | Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan yang ada di kabupaten/kota | 5 | | 25 | | 50 |
| | a. ≤ 20 | | 200 | | 50 | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|------------------------------------|------|-------------|-----------|------|------------|
| | b. 21-40 | | 400 | | 100 | |
| | c. 41-70 | | 600 | | 150 | |
| | d. 71-100 | | 800 | | 200 | |
| | e. >100 | | 1.000 | | 250 | |
| 7 | Jumlah pengecer minuman beralkohol | 5 | | 5 | | 20 |
| | a. ≤ 3 | | 200 | | 10 | |
| | b. 4-6 | | 400 | | 20 | |
| | c. 7-10 | | 600 | | 30 | |
| | d. 11-13 | | 800 | | 40 | |
| | e. >13 | | 1.000 | | 50 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 210 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 340 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 476 |

29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|---|-------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah | 3.026 | | 60 | | 240 |
| | a. ≤ 3.000 | | 200 | | 120 | |
| | b. 3.001 –5.500 | | 400 | | 240 | |
| | c. 5.501-8.000 | | 600 | | 360 | |
| | d. 8.001-11.000 | | 800 | | 480 | |
| | e. > 11.000 | | 1.000 | | 600 | |
| 2 | Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah | 3.026 | | 20 | | 40 |
| | a. ≤ 8.000 | | 200 | | 40 | |
| | b. 8.001-16.000 | | 400 | | 80 | |
| | c. 16.001-25.000 | | 600 | | 120 | |
| | d. 25.001-60.000 | | 800 | | 160 | |
| | e. > 60.000 | | 1.000 | | 200 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 280 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 410 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 574 |

30. Sekretariat Daerah

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|--|------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah kecamatan | 7 | | | | |
| | a. ≤ 5 | | 200 | | 30 | |
| | b. 6-10 | | 400 | | 60 | |
| | c. 11-15 | | 600 | | 90 | |
| | d. 16-20 | | 800 | | 120 | |
| | e. >20 | | 1.000 | | 150 | |
| 2 | Jumlah desa/kelurahan | 39 | | | | |
| | a. ≤ 50 | | 200 | | 10 | |
| | b. 51-100 | | 400 | | 20 | |
| | c. 101-200 | | 600 | | 30 | |
| | d. 201-300 | | 800 | | 40 | |
| | e. > 300 | | 1.000 | | 50 | |
| 3 | Jumlah Perangkat Daerah (selain kecamatan) | 25 | | | | |
| | a. ≤ 25 | | 200 | | 40 | |
| | b. 26-29 | | 400 | | 80 | |
| | c. 30-33 | | 600 | | 120 | |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------|-----------|------|------------|
| | d. 34-37 | | 800 | | 160 | |
| | e. > 37 | | 1.000 | | 120 | |
| 4 | Jumlah kebijakan Daerah (peraturan kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota dan peraturan bersama kepala daerah) yang masih berlaku | 533 | | | | |
| | a. ≤ 50 | | 200 | 15 | 30 | 150 |
| | b. 51-100 | | 400 | | 60 | |
| | c. 101-150 | | 600 | | 90 | |
| | d. 151-200 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 200 | | 1.000 | | 150 | |
| 5 | Jumlah pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah kabupaten/kota | 2.786 | | | | |
| | a. ≤ 2.000 | | 200 | 10 | 20 | 40 |
| | b. 2.001-3.000 | | 400 | | 40 | |
| | c. 3.001-4.000 | | 600 | | 60 | |
| | d. 4.001-9.000 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 9.000 | | 1.000 | | 100 | |
| 6 | Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp) | 802.624.974.233,04 | | | | |
| | a. ≤ 250.000.000.000 | | 200 | 15 | 30 | 120 |
| | b. 250.000.000.001-500.000.000.000 | | 400 | | 60 | |
| | c. 500.000.000.001-750.000.000.000 | | 600 | | 90 | |
| | d. 750.000.000.001 - 1.000.000.000.000 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 1.000.000.000.000 | | 1.000 | | 150 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 420 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 550 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 770 |

31. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah anggota DPRD | 25 | | | | |
| | a. ≤ 25 | | 200 | 40 | 80 | 80 |
| | b. 26-30 | | 400 | | 160 | |
| | c. 31-35 | | 600 | | 240 | |
| | d. 36-40 | | 800 | | 320 | |
| | e. > 40 | | 1.000 | | 400 | |
| 2 | Jumlah fraksi DPRD | 6 | | | | |
| | a. ≤ 2 | | 200 | 40 | 80 | 240 |
| | b. 3-4 | | 400 | | 160 | |
| | c. 5-6 | | 600 | | 240 | |
| | d. 7-8 | | 800 | | 320 | |
| | e. > 8 | | 1.000 | | 400 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 320 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 450 |
| Pengali | | | | | | |
| Jumlah Skor | | | | | | 450 |

32. Inspektorat

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp) | 802.624.974.233,04 | | 30 | | 240 |
| | a. ≤ 250.000.000.000 | | 200 | | 60 | |
| | b. 250.000.000.001-500.000.000.000 | | 400 | | 120 | |
| | c. 500.000.000.001-750.000.000.000 | | 600 | | 180 | |
| | d. 750.000.000.001 - 1.000.000.000.000 | | 800 | | 240 | |
| | e. > 1.000.000.000.000 | | 1.000 | | 300 | |
| 2 | Jumlah kecamatan | 7 | | 15 | | 60 |
| | a. ≤ 5 | | 200 | | 30 | |
| | b. 6-10 | | 400 | | 60 | |
| | c. 11-15 | | 600 | | 90 | |
| | d. 16-20 | | 800 | | 120 | |
| | e. >20 | | 1.000 | | 150 | |
| 3 | Jumlah desa/kelurahan | 39 | | 10 | | 20 |
| | a. ≤ 50 | | 200 | | 20 | |
| | b. 51-100 | | 400 | | 40 | |
| | c. 101-200 | | 600 | | 60 | |
| | d. 201-300 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 300 | | 1.000 | | 100 | |
| 4 | Jumlah Perangkat Daerah selain kecamatan | 25 | | 15 | | 30 |
| | a. ≤ 25 | | 200 | | 30 | |
| | b. 26-29 | | 400 | | 60 | |
| | c. 30-33 | | 600 | | 90 | |
| | d. 34-37 | | 800 | | 120 | |
| | e. >37 | | 1.000 | | 150 | |
| 5 | Jumlah pegawai aparatur sipil negara pada instansi Daerah kabupaten/kota | 2.786 | | 10 | | 40 |
| | a. ≤ 2.000 | | 200 | | 20 | |
| | b. 2.001-3.000 | | 400 | | 40 | |
| | c. 3.001-4.000 | | 600 | | 60 | |
| | d. 4.001-9.000 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 9.000 | | 1.000 | | 100 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 390 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 520 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 728 |

33. Fungsi Penunjang Keuangan

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp) | 802.624.974.233,04 | | 25 | | 200 |
| | a. ≤ 250.000.000.000 | | 200 | | 50 | |
| | b. 250.000.000.001-500.000.000.000 | | 400 | | 100 | |
| | c. 500.000.000.001-750.000.000.000 | | 600 | | 150 | |
| | d. 750.000.000.001-1.000.000.000.000 | | 800 | | 200 | |
| | e. > 1.000.000.000.000 | | 1.000 | | 250 | |
| 2 | Jumlah pengguna anggaran | 34 | | 5 | | 30 |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|----------|-------------|-----------|------|------------|
| | a. ≤ 25 | | 200 | | 10 | |
| | b. 26-30 | | 400 | | 20 | |
| | c. 31-35 | | 600 | | 30 | |
| | d. 36-40 | | 800 | | 40 | |
| | e. > 40 | | 1.000 | | 50 | |
| 3 | Jumlah barang inventaris milik Daerah | 930.316 | | 15 | | 150 |
| | a. ≤ 20.000 | | 200 | | 30 | |
| | b. 20.001-40.000 | | 400 | | 60 | |
| | c. 40.001-60.000 | | 600 | | 90 | |
| | d. 60.001-80.000 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 80.000 | | 1.000 | | 150 | |
| 4 | Jumlah objek pajak kabupaten/kota | 54.597 | | 20 | | 160 |
| | a. ≤ 10.000 | | 200 | | 40 | |
| | b. 10.001-20.000 | | 400 | | 80 | |
| | c. 20.001-50.000 | | 600 | | 120 | |
| | d. 50.001-100.000 | | 800 | | 160 | |
| | e. > 100.000 | | 1.000 | | 200 | |
| 5 | Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) | 2.506,91 | | 15 | | 150 |
| | a. ≤ 25 | | 200 | | 30 | |
| | b. 26-100 | | 400 | | 60 | |
| | c. 101 -500 | | 600 | | 90 | |
| | d. 501 -1.500 | | 800 | | 120 | |
| | e. > 1.500 | | 1.000 | | 150 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 690 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 820 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 1148 |

34. Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor | |
|----|--|------|-------------|-----------|------|------------|-----|
| 1 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah kabupaten/kota | 29 | | 10 | 20 | 20 | |
| | a. ≤ 30 | | 200 | | | | |
| | b. 31-34 | | 400 | | 40 | | |
| | c. 35-39 | | 600 | | 60 | | |
| | d. 40-42 | | 800 | | 80 | | |
| 2 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah kabupaten/kota | 820 | | 40 | | 80 | |
| | a. ≤ 1.000 | | 200 | | 80 | | |
| | b. 1.001-2.000 | | 400 | | 160 | | |
| | c. 2.001-3.000 | | 600 | | 240 | | |
| | d. 3.001-4.000 | | 800 | | 320 | | |
| 3 | Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah kabupaten/kota | 1880 | | 30 | | 120 | |
| | a. ≤ 1.000 | | 200 | | 60 | | |
| | b. 1.001-4.000 | | 400 | | 120 | | |
| | c. 4.001-6.000 | | 600 | | 180 | | |
| | d. 6.001-8.000 | | 800 | | 240 | | |
| | e. > 8.000 | | 1.000 | 300 | | | |
| | Jumlah Skor Teknis | | | | | | 220 |
| | Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 350 |
| | Pengali | | | | | | 1.4 |
| | Jumlah Skor | | | | | | 490 |

35. Fungsi Penunjang Perencanaan

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|---|------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (tidak termasuk kecamatan) | 25 | | 70 | | 140 |
| | a. ≤ 25 | | 200 | | 140 | |
| | b. 26-29 | | 400 | | 280 | |
| | c. 30-33 | | 600 | | 420 | |
| | d. 34-37 | | 800 | | 560 | |
| | e. > 37 | | 1.000 | | 700 | |
| 2 | Jumlah komisi DPRD kabupaten/kota | 3 | | 2 | | 4 |
| | a. ≤ 3 | | 200 | | 4 | |
| | b. 4-5 | | 400 | | 8 | |
| | c. 6-7 | | 600 | | 12 | |
| | d. 8-9 | | 800 | | 16 | |
| | e. > 9 | | 1.000 | | 20 | |
| 3 | Jumlah kecamatan | 7 | | 3 | | 14 |
| | a. ≤ 5 | | 200 | | 6 | |
| | b. 6-10 | | 400 | | 14 | |
| | c. 11-15 | | 600 | | 18 | |
| | d. 16-20 | | 800 | | 24 | |
| | e. > 20 | | 1.000 | | 30 | |
| 4 | Jumlah kelurahan/desa atau nama lain | 39 | | 5 | | 10 |
| | a. ≤ 50 | | 200 | | 10 | |
| | b. 51-100 | | 400 | | 20 | |
| | c. 101-200 | | 600 | | 30 | |
| | d. 201-300 | | 800 | | 40 | |
| | e. > 300 | | 1.000 | | 50 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 168 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 298 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 417.2 |

36. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|----------------------------------|--|----------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) | 32 | | 25 | | 50 |
| | a. ≤ 35 | | 200 | | 50 | |
| | b. 35-40 | | 400 | | 100 | |
| | c. 41-50 | | 600 | | 150 | |
| | d. 51-60 | | 800 | | 200 | |
| | e. > 60 | | 1.000 | | 250 | |
| 2 | Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) | 2.506,91 | | 10 | | 60 |
| | a. ≤ 150 | | 200 | | 20 | |
| | b. 151-2.000 | | 400 | | 40 | |
| | c. 2.001 -3.000 | | 600 | | 60 | |
| | d. 3.001 -4.000 | | 800 | | 80 | |
| | e. > 4.000 | | 1.000 | | 100 | |
| 3 | Jumlah kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota) | 533 | | 45 | | 180 |
| | a. ≤ 100 | | 200 | | 90 | |
| | b. 101-700 | | 400 | | 180 | |
| | c. 701-1.200 | | 600 | | 270 | |
| | d. 1.201-1.500 | | 800 | | 360 | |
| | e. > 1.500 | | 1.000 | | 450 | |
| Jumlah Skor Teknis | | | | | | 290 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis | | | | | | 420 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor | | | | | | 588 |

37. Kecamatan

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|--|---|--------|-------------|-----------|------|------------|
| 1 | Luas wilayah kecamatan (Km ²) | | | | | |
| | Kecamatan Damar | 236,68 | | | | 200 |
| | Kecamatan Dendang | 364 | | | | 200 |
| | Kecamatan Kelapa Kampit | 498,51 | | | | 200 |
| | Kecamatan Simpang Renggiang | 259,2 | | | | 200 |
| | Kecamatan Gantung | 546,3 | | | | 200 |
| | Kecamatan Manggar | 299 | | | | 200 |
| | Kecamatan Simpang Pesak | 246 | | | | 200 |
| | a. ≤ 5 | | 200 | 20 | 40 | |
| | b. 6-10 | | 400 | | 80 | |
| | c. 11-50 | | 600 | | 120 | |
| | d. 51-100 | | 800 | | 160 | |
| | e. > 100 | | 1.000 | | 200 | |
| 2 | Jumlah kelurahan/desa atau nama lain | | | | | |
| | Kecamatan Damar | 5 | | | | 70 |
| | Kecamatan Dendang | 4 | | | | 70 |
| | Kecamatan Kelapa Kampit | 6 | | | | 140 |
| | Kecamatan Simpang Renggiang | 4 | | | | 70 |
| | Kecamatan Gantung | 7 | | | | 140 |
| | Kecamatan Manggar | 9 | | | | 140 |
| | Kecamatan Simpang Pesak | 4 | | | | 70 |
| | a. ≤ 5 | | 200 | 35 | 70 | |
| | b. 6-10 | | 400 | | 140 | |
| | c. 11-15 | | 600 | | 210 | |
| | d. 16-20 | | 800 | | 280 | |
| | e. > 20 | | 1.000 | | 350 | |
| 3 | Jumlah penduduk kecamatan | | | | | |
| | Kecamatan Damar | 12.998 | | | | 200 |
| | Kecamatan Dendang | 10.567 | | | | 200 |
| | Kecamatan Kelapa Kampit | 17.780 | | | | 250 |
| | Kecamatan Simpang Renggiang | 7.137 | | | | 150 |
| | Kecamatan Gantung | 26.886 | | | | 250 |
| | Kecamatan Manggar | 38.169 | | | | 250 |
| | Kecamatan Simpang Pesak | 8.289 | | | | 150 |
| | a. ≤ 2.500 | | 200 | 25 | 50 | |
| | b. 2.501-5.000 | | 400 | | 100 | |
| | c. 5.001-10.000 | | 600 | | 150 | |
| | d. 10.001-15.000 | | 800 | | 200 | |
| | e. > 15.000 | | 1.000 | | 250 | |
| Jumlah Skor Teknis Kecamatan Damar | | | | | | 470 |
| Jumlah Skor Teknis Kecamatan Dendang | | | | | | 470 |
| Jumlah Skor Teknis Kecamatan Kelapa Kampit | | | | | | 590 |
| Jumlah Skor Teknis Kecamatan Simpang Renggiang | | | | | | 420 |
| Jumlah Skor Teknis Kecamatan Gantung | | | | | | 590 |
| Jumlah Skor Teknis Kecamatan Manggar | | | | | | 590 |
| Jumlah Skor Teknis Kecamatan Simpang Pesak | | | | | | 420 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis Kecamatan Damar | | | | | | 600 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis Kecamatan Dendang | | | | | | 600 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis Kecamatan Kelapa Kampit | | | | | | 720 |

| No | Indikator dan Kelas Interval | Data | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|---|------------------------------|------|-------------|-----------|------|------------|
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis Kecamatan Simpang Renggang | | | | | | 550 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis Kecamatan Gantung | | | | | | 720 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis Kecamatan Manggar | | | | | | 720 |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis Kecamatan Simpang Pesak | | | | | | 550 |
| Pengali | | | | | | 1.4 |
| Jumlah Skor Kecamatan Damar | | | | | | 840 |
| Jumlah Skor Kecamatan Dendang | | | | | | 840 |
| Jumlah Skor Kecamatan Kelapa Kampit | | | | | | 1008 |
| Jumlah Skor Kecamatan Simpang Renggang | | | | | | 770 |
| Jumlah Skor Kecamatan Gantung | | | | | | 1008 |
| Jumlah Skor Kecamatan Manggar | | | | | | 1008 |
| Jumlah Skor Kecamatan Simpang Pesak | | | | | | 770 |

Dari hasil pemetaan masing-masing urusan yang diselenggarakan di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, diperoleh hasil tipologi urusan sebagai berikut:

| No | Urusan Pemerintahan | Skor | Tipologi |
|----|---|-------|----------|
| 1 | Pendidikan | 826 | A |
| 2 | Kesehatan | 910 | A |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 820 | A |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 459 | C |
| 5 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Suburusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) | 1134 | A |
| 6 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Suburusan Kebakaran) | 574 | C |
| 7 | Sosial | 1067 | A |
| 8 | Tenaga Kerja | 630 | B |
| 9 | Transmigrasi | 0 | - |
| 10 | Perhubungan (kepulauan) | 700 | B |
| 11 | Komunikasi dan Informatika | 674,8 | B |
| 12 | Kebudayaan | 1050 | A |
| 13 | Kepemudaan dan Olahraga | 994 | A |
| 14 | Pariwisata | 1050 | A |
| 15 | Penanaman Modal | 770 | B |
| 16 | Perindustrian | 574 | C |
| 17 | Perdagangan | 476 | C |
| 18 | Koperasi dan UKM | 406 | C |

| No | Urusan Pemerintahan | Skor | Tipologi |
|----|--|-------|------------------|
| 19 | Pertanian | 806,4 | A |
| 20 | Kehutanan | 0 | - |
| 21 | Pangan | 518 | C |
| 22 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 924 | A |
| 23 | Kelautan dan Perikanan | 840 | A |
| 24 | ESDM | 0 | - |
| 25 | Statistik | 406 | C |
| 26 | Lingkungan Hidup | 882 | A |
| 27 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 624,4 | B |
| 28 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 812 | A |
| 29 | Kearsipan | 530 | C |
| 30 | Perpustakaan | 692 | B |
| 31 | Pengendalian Penduduk dan KB | 423 | C |
| 32 | Persandian | 322 | setingkat bidang |
| 33 | Pertanahan | 630 | B |
| 34 | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 490 | C |
| 35 | Perencanaan | 417,2 | C |
| 36 | Penelitian dan Pengembangan | 588 | C |
| 37 | Keuangan | 1148 | A |
| 38 | Sekretariat Daerah | 770 | B |
| 39 | Sekretariat DPRD | 450 | C |
| 40 | Inspektorat | 728 | B |
| 41 | Kecamatan Damar | 840 | A |
| 42 | Kecamatan Dendang | 840 | A |
| 43 | Kecamatan Gantung | 1008 | A |
| 44 | Kecamatan Manggar | 1008 | A |
| 45 | Kecamatan Kelapa Kampit | 1008 | A |
| 46 | Kecamatan Simpang Pesak | 770 | B |
| 47 | Kecamatan Simpang Renggang | 770 | B |

Dari hasil tersebut, kemudian dilakukan pengelompokan urusan berdasarkan rumpun dan nilai pemetaan untuk memperoleh susunan perangkat daerah yang baru. Terdapat beberapa urusan yang sebelumnya digabung menjadi 1 (satu) dinas, pada pemetaan kali ini dipisahkan dengan beberapa pertimbangan.

Pada pemetaan sebelumnya, Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan digabung dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Namun terdapat kendala dimana IKM bidang kesehatan tidak terpenuhi secara maksimal karena terdapat pembagian pengelolaan urusan pada dinas bersangkutan yang mengakibatkan sumber daya yang ada terpecah. Hal tersebut kemudian menjadi pertimbangan untuk memisahkan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan menjadi dinas tersendiri untuk memfokuskan sumber daya pada dinas tersebut untuk pemenuhan IKM bidang kesehatan.

Untuk selanjutnya, Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipisahkan dari Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah pada dinas sebelumnya, nomenklatur Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak muncul pada nomenklatur dinas. Tidak munculnya nama urusan pada nomenklatur dinas mengakibatkan Pemerintah Provinsi dan Pusat mengasumsikan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak diselenggarakan di tingkat Pemerintah Kabupaten. Hal tersebut menjadi penghambat bagi dinas/bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugasnya. Pertimbangan kedua adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah satu-satunya dinas di Daerah yang menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan yang berkoordinasi pada 4 (empat) kementerian yang berbeda yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada pemetaan kali ini diambil keputusan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya akan menyelenggarakan 2 (dua) urusan saja yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digabung menjadi satu dinas karena masih serumpun

untuk kemudian menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Fungsi Penunjang Keuangan dipisah menjadi 2 (dua) badan yang berbeda yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah. Pemisahan tersebut dimaksudkan agar Badan Pendapatan Daerah fokus pada upaya mengintensifkan penerimaan pendapatan daerah.

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dipisahkan menjadi 1 (satu) dinas dengan beberapa pertimbangan yaitu untuk memudahkan proses pelayanan perizinan dan untuk ke depannya dapat dijadikan role model untuk pengembangan mall pelayanan publik. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang sebelumnya diselenggarakan oleh dinas yang berbeda, digabungkan menjadi 1 (satu) dinas untuk memudahkan pelaksanaan dan koordinasi urusan tersebut.

Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tetap pada tipe A dengan catatan bahwa apabila terdapat usulan rancangan Perangkat Daerah terbaru tidak disetujui pada rapat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jumlah Perangkat Daerah yang disetujui berjumlah kurang dari atau sama dengan 25 dinas atau badan (tidak termasuk kecamatan), maka Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah turun menjadi tipe B.

Dari hasil pengelompokan dan penggabungan urusan tersebut, diperoleh rancangan perangkat daerah sebagai berikut:

| No | Perangkat Daerah | Urusan Pemerintahan | Hasil Skor | Tipe |
|----|---|--|----------------|------|
| 1. | Dinas Kesehatan | Kesehatan | 910 (Tipe A) | A |
| 2. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Sosial | 1067 (Tipe A) | A |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 624,2 (Tipe B) | |
| 3. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 812 (Tipe A) | A |
| | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 423 (Tipe C) | |
| 4. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Keuangan | 1148 (Tipe A) | A |
| 5. | Badan Pendapatan Daerah | | | B |
| 6. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu | Penanaman Modal | 770 (Tipe B) | B |
| 7. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Perindustrian | 476 (Tipe C) | B |
| | | Perdagangan | 574 (Tipe C) | |
| 8. | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | A |

| No | Perangkat Daerah | Urusan Pemerintahan | Hasil Skor | Tipe |
|-----|--|--|----------------|------|
| | | a. Suburusan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1134 (Tipe A) | |
| | | b. Suburusan Kebakaran | 574 (Tipe C) | |
| 9. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Perpustakaan | 692 (Tipe B) | B |
| | | Kearsipan | 530 (Tipe C) | |
| 10. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 820 (Tipe A) | A |
| 11. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | Pertanahan | 630 (Tipe B) | A |
| | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 459 (Tipe C) | |
| 12. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Pertanian | 806,4 (Tipe A) | A |
| | | Pangan | 518 (Tipe C) | |
| 13. | Dinas Pendidikan | Pendidikan | 826 (Tipe A) | A |
| 14. | Dinas Perhubungan | Perhubungan | 700 (Tipe B) | B |
| 15. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Kepemudaan dan Olahraga | 994 (Tipe A) | A |
| 16. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Komunikasi dan Informatika | 674,8 (Tipe B) | A |
| | | Statistik | 406 (Tipe C) | |
| | | Persandian | 322 (Bidang) | |
| 17. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 924 (Tipe A) | A |
| 18. | Dinas Perikanan | Kelautan dan Perikanan | 840 (Tipe A) | A |
| 19. | Dinas Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | 882 (Tipe A) | A |
| 20. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja | Tenaga Kerja | 546 (Tipe C) | B |
| | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 406 (Tipe C) | |
| 21. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Kebudayaan | 1050 (Tipe A) | A |
| | | Pariwisata | 1050 (Tipe A) | |
| 22. | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Perencanaan | 417,2 (Tipe C) | A |
| | | Penelitian dan Pengembangan | 588 (Tipe C) | |
| 23. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 490 (Tipe C) | C |
| 24. | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | 770 (Tipe B) | A |
| 25. | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 450 (Tipe C) | C |
| 26. | Inspektorat | Inspektorat | 728 (Tipe B) | B |
| 27. | Kecamatan Damar | | 840 (Tipe A) | A |
| 28. | Kecamatan Dendang | | 840 (Tipe A) | A |
| 29. | Kecamatan Kelapa Kampit | | 1008 (Tipe A) | A |
| 30. | Kecamatan Gantung | | 1008 (Tipe A) | A |
| 31. | Kecamatan Manggar | | 1190 (Tipe A) | A |
| 32. | Kecamatan Simpang Renggiang | | 770 (Tipe B) | B |
| 33. | Kecamatan Simpang Pesak | | 770 (Tipe B) | B |
| 34. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | |
| 35. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | |

Dari hasil penyusunan rancangan Perangkat Daerah yang baru, diperoleh hasil sebanyak 35 perangkat daerah, yang berarti terdapat penambahan 3 perangkat

daerah baru dari jumlah Perangkat Daerah eksisting yang hanya sebanyak 32 Perangkat Daerah.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan berdasarkan penambahan jumlah Perangkat Daerah tersebut. Pertama adalah terkait kebutuhan gedung kantor bagi 3 Perangkat Daerah yang baru.

Hal kedua yang harus diperhatikan adalah penambahan kebutuhan pejabat administrasi setingkat pengawas, administrator dan pimpinan tinggi pratama. Berdasarkan hasil perhitungan sementara dengan pola perangkat daerah maksimal, diperoleh jumlah kebutuhan pejabat administrasi sebagai berikut:

| No | Rancangan Perangkat Daerah | Urusan Pemerintahan | Tipologi | Eselon | | | | | | Jumlah Ess |
|----|---|---|----------|--------|-----|------|------|-----|-----|------------|
| | | | | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa | IVb | |
| 1 | Dinas Pendidikan | Pendidikan | B | | 1 | 1 | 4 | 15 | | 21 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Kesehatan | A | | 1 | 1 | 4 | 15 | | 21 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | A | | 1 | 1 | 4 | 15 | | 21 |
| 4 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan | B | | 1 | 1 | 3 | 11 | | 16 |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum b. Sub Urusan Kebakaran | A | | 1 | 1 | 4 | 15 | | 21 |
| 6 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Sosial Pemdes | A | | 1 | 1 | 4 | 15 | | 21 |
| 7 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja | Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | B | | 1 | 1 | 3 | 11 | | 16 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB | A | | 1 | 1 | 4 | 15 | | 21 |
| 9 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Pertanian Pangan | A | | 1 | 1 | 5 | 18 | | 25 |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | A | | 1 | 1 | 4 | 15 | | 21 |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | A | | 1 | 1 | 4 | 15 | | 21 |
| 12 | Dinas Perhubungan | Perhubungan | B | | 1 | 1 | 3 | 11 | | 16 |
| 13 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Komunikasi dan Informatika Statistik Persandian | A | | 1 | 1 | 4 | 15 | | 21 |
| 14 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Penanaman Modal | B | | 1 | 1 | 3 | 11 | | 16 |

| No | Rancangan Perangkat Daerah | Urusan Pemerintahan | Tipologi | Eselon | | | | | | Jumlah Ess |
|----|--|---------------------------------------|----------|--------|-----|------|------|-----|-----|------------|
| | | | | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa | IVb | |
| 15 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Kepemudaan dan Olahraga | A | | 1 | 1 | 4 | 15 | | 21 |
| 16 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Kebudayaan dan Pariwisata | A | | 1 | 1 | 4 | 15 | | 21 |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Perpustakaan dan Kearsipan | B | | 1 | 1 | 3 | 11 | | 16 |
| 18 | Dinas Perikanan | Kelautan dan Perikanan | A | | 1 | 1 | 4 | 15 | | 21 |
| 19 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Perindustrian dan Perdagangan | B | | 1 | 1 | 3 | 11 | | 16 |
| 20 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Perencanaan dan Pengembangan | A | | 1 | 1 | 3 | 11 | | 16 |
| 21 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Keuangan | A | | 1 | 1 | 4 | 15 | | 21 |
| 22 | Badan Pendapatan Daerah | Keuangan | B | | 1 | 1 | 3 | 11 | | 16 |
| 23 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | C | | 1 | 1 | 2 | 8 | | 12 |
| 24 | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | A | 1 | 3 | 9 | | 27 | | 40 |
| 25 | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | C | | 1 | 3 | | 6 | | 10 |
| 26 | Inspektorat | Inspektorat | B | | 1 | 5 | | 2 | | 8 |
| 27 | Kecamatan Damar | Kecamatan | A | | | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 28 | Kecamatan Dendang | | A | | | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 29 | Kecamatan Kelapa Kampit | | A | | | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 30 | Kecamatan Gantung | | A | | | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 31 | Kecamatan Manggar | | A | | | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 32 | Kecamatan Simpang Renggiang | | B | | | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 33 | Kecamatan Simpang Pesak | | B | | | 1 | 1 | 2 | | 4 |
| 34 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | 1 | | 4 | 2 | 7 |
| 35 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | 1 | | 4 | | 5 |
| | | | | | 1 | 27 | 49 | 90 | 383 | 14 |
| 1 | UPT RSUD | | | | | | 3 | 7 | | 10 |
| 2 | UPT PUSKESMAS (7) | | | | | | | | 7 | 7 |
| 3 | UPT PAM | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 4 | UPT Pengelola Pasar | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 5 | UPT Laboratorium Lingkungan | | | | | | | 1 | | 1 |
| 6 | UPT Perikanan Budidaya | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 7 | UPT Pengolahan Hasil Perikanan | | | | | | | 1 | | 1 |
| 8 | UPT Balai Perbenihan Tanaman | | | | | | | 1 | | 1 |
| 9 | UPT Perlindungan Perempuan dan Anak | | | | | | | 1 | | 1 |
| | | | | | | | | 3 | 14 | 11 |
| 1 | Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik | | | | 1 | | | | | |
| 2 | Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan | | | | 1 | | | | | |

| No | Rancangan Perangkat Daerah | Urusan Pemerintahan | Tipologi | Eselon | | | | | | Jumlah Ess |
|----|--|---------------------|----------|--------|-----|------|------|-----|-----|------------|
| | | | | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa | IVb | |
| 3 | Staf Ahli Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | |

Dilihat dari tabel di atas, terdapat penambahan jumlah kebutuhan pejabat administrasi yang cukup signifikan dari yang sebelumnya berjumlah 477 pejabat administrasi menjadi 581 pejabat administrasi. Hal tersebut harus diperhitungkan secara seksama, mengingat dengan kondisi sekarang saja terdapat kekurangan pejabat administrasi sebanyak 64 orang. Apabila membandingkan kondisi eksisting dengan kebutuhan ke depan, berarti terdapat kekurangan sebanyak 168 pejabat administrasi. Apabila rancangan Perangkat Daerah ini disetujui, maka perlu dilakukan pendataan ulang terkait jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan administrasi pada masing-masing jenjang.

Namun kondisi tersebut belum memperhatikan kebijakan pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang menjadi salah satu prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024 yang saat ini sedang dalam tahap menunggu validasi hasil identifikasi pengalihan jabatan pengawas ke jabatan fungsional yang sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli dan Amandemen)

Dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan bahwa “Negara” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan (Machtstaat). Demikian juga dinyatakan bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sedangkan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat dalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, ayat (2) menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “, ayat (5) menyatakan bahwa: “ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua).

Rekomendasi:

Apabila dicermati kalimat Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa (dst) dan keadilan sosial. Kemudian memperhatikan dan mencermati Amandemen UUD NKRI Tahun 1945 dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, ayat (2) menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, ayat (5) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua). Dengan memperhatikan dan mencermati dengan seksama setiap kalimat tersebut di atas, sudah semestinya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan penataan Perangkat Daerah agar pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Daerah dapat dijalankan secara optimal.

- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Pertimbangan undang-undang ini dalam huruf (a) menyatakan bahwa: sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang, dalam huruf (b) menyatakan bahwa: penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pertimbangan huruf (c) menyatakan bahwa: efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Urusan pemerintahan wajib, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi 2, yaitu:
 1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari:
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - f) Sosial.

2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :
 - a) Tenaga Kerja;
 - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c) Pangan;
 - d) Pertanahan;
 - e) Lingkungan Hidup;
 - f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i) Perhubungan;
 - j) Komunikasi dan Informatika;
 - k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - l) Penanaman Modal;
 - m) Kepemudaan dan Olah Raga;
 - n) Statistik;
 - o) Persandian;
 - p) Kebudayaan;
 - q) Perpustakaan; dan
 - r) Kearsipan.
- b. Urusan pemerintahan pilihan, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, antara lain :
 - a) Kelautan dan Perikanan;
 - b) Pariwisata;
 - c) Pertanian;
 - d) Kehutanan;
 - e) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f) Perdagangan;
 - g) Perindustrian;
 - h) Transmigrasi.

Seluruh urusan pemerintahan tersebut diwadahi dalam bentuk dinas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 217 disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) tipe dinas yang diklasifikasikan berdasarkan beban kerja, yaitu:

- 1) Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar;
- 2) Dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang;

- 3) Dinas tipe C yang dibentuk untuk mawadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil.

Selain itu, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah harus didukung oleh fungsi penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari:

- a. Perencanaan;
- b. Kepegawaian;
- c. Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Keuangan;
- e. Penelitian dan Pengembangan; dan
- f. fungsi lainnya sesuai ketentuan perundang-perundangan.

Untuk penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di daerah akan diwadahi oleh badan. Klasifikasi badan menurut beban kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Badan tipe A dibentuk untuk mawadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. Badan tipe B dibentuk untuk mawadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. Badan tipe C dibentuk untuk mawadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melakukan penataan Perangkat Daerahnya dengan memperhatikan keterlaksanaan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan, fungsi penunjang serta urusan pilihan yang memiliki potensi dan sesuai dengan kearifan lokal. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan intensitas urusan pemerintahan, potensi daerah, efisiensi, efektifitas dan pembagian habis tugas.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah ini memuat panduan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian perangkat daerah. Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan kelembagaan organisasi perangkat Daerah secara tepat fungsi (*right function*) dan tepat ukuran (*right sizing*). Sehingga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta tersinkronisasi dan selaras dengan program-program kerja dari Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C. Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur ketentuan pembentukan dinas, badan, dan penunjang urusan pemerintahan berdasarkan perhitungan skor variabel dan struktur organisasi perangkat Daerah menurut klasifikasi besar beban kerja, yaitu sebagai berikut:

I. Dinas

I.1. Ketentuan kelembagaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Tipe A dibentuk apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800, dengan struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing paling banyak 3 (tiga) seksi atau kelompok jabatan fungsional;
- b. Dinas Tipe B dibentuk apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800, dengan struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing paling banyak 3 (tiga) seksi atau kelompok jabatan fungsional;
- c. Dinas Tipe C dibentuk apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 sampai dengan 600, dengan struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing 3 (tiga) seksi atau kelompok jabatan fungsional.
- d. menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 sampai dengan 400;
- e. menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300.

I.2. Penggabungan Urusan Pemerintahan dan Dinas

Penggabungan urusan dapat dilakukan berdasarkan kriteria pengelompokan urusan pemerintahan sebagai berikut:

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- g. perpustakaan dan kearsipan.

Penggabungan urusan pemerintahan juga bisa terjadi jika tidak memenuhi persyaratan skor variabel untuk dibentuk dinas dengan urusan pemerintahan yang telah terbentuk dinas dapat menyebabkan kenaikan tipologi dari dinas tersebut atau bertambah bidang baru apabila terdapat penggabungan urusan pemerintahan setingkat bidang (skor 301-400). Namun untuk nomenklatur dinas hasil penggabungan adalah nomenklatur dinas utama sebelum penggabungan.

Kemudian dengan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 sampai dengan 500 sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi satu dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, serta dapat digabung dengan dinas atau badan tipe A sehingga menjadi 5 (lima) bidang. Dan untuk nomenklatur dinas hasil penggabungan ini adalah mencerminkan urusan pemerintahan yang digabungkan.

II. Badan

Ketentuan pembentukan badan dan struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

- a. Badan tipe A dibentuk dengan total skor variabel lebih dari 800. Terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbidang atau jabatan fungsional.
- b. Badan tipe B dibentuk dengan total skor variabel 601 sampai dengan 800. Terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbidang atau jabatan fungsional.
- c. Badan tipe C dibentuk dengan total skor variabel kurang dari 400. Terdiri dari 1 (satu) sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang atau jabatan fungsional.

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam PP No 18 tahun 2016 , apabila skor variabel fungsi penunjang tidak memenuhi untuk dibentuk menjadi badan, yaitu kurang dari 400, ataupun akan dilakukan penggabungan badan tipe C dengan pertimbangan keterbatasan anggaran Daerah, fungsi penunjang tersebut digabung dengan badan lain, dengan kedekatan karakteristik sebagai berikut :

- a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
- b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan

Khusus untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, boleh menambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan tipeloginya, selain itu apabila skor variabel fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan berada pada interval 950-975 maka dapat dibentuk menjadi 2 (dua) badan tipe B, dan apabila skor di atas 975 maka dapat dibentuk menjadi 2 (dua) badan tipe A, dengan nomenklatur sebagai berikut:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- b. Badan Pendapatan Daerah

Namun apabila telah dibentuk menjadi 2 (dua) badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan maka ketentuan penambahan 2 (dua) bidang tidak berlaku lagi.

III. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota, mempunyai tugas membantu Bupati/Wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengklasifikasian Sekretariat Daerah menurut beban kerjanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Sekretariat Daerah tipe A dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar; apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800;
- b) Sekretariat Daerah tipe B dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800; dan
- c) Sekretariat Daerah tipe C dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.

Dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a) Sekretariat Daerah tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten dengan paling banyak membawahi 4 (empat) bagian yang masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- b) Sekretariat Daerah tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten dengan paling banyak membawahi 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- c) Sekretariat Daerah tipe C tipe C, terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten dengan paling banyak membawahi 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

IV. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, dimana dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

Pengklasifikasian sekretariat DPRD menurut besar beban kerjanya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Sekretariat DPRD Tipe A dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar; apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800;
- b) Sekretariat DPRD Tipe B dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800, dan

- c) Sekretariat DPRD Tipe C dibentuk untuk mewisadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.

Dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian dengan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- b) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3(tiga) bagian dengan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- c) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 3(tiga) bagian dengan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

V. Inspektorat

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pengklasifikasian inspektorat Daerah sesuai beban kerjanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Inspektorat tipe A dibentuk untuk mewisadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar; apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800;
- b) Inspektorat tipe B dibentuk untuk mewisadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800; dan

- c) Inspektorat tipe C dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.

Dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
- b) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
- c) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.

VI. Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, yang dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan bupati/wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dibantu oleh perangkat kecamatan, camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan besarnya beban kerja, Kecamatan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) tipe, yaitu:

- a. Kecamatan tipe A, dibentuk apabila skor variabel di atas 600, untuk memudahhi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang besar. Dengan susunan organisasi terdiri dari atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan paling banyak 5 (lima) seksi.
- b. Kecamatan tipe B, dibentuk apabila skor variabel kurang dari 600, untuk memudahhi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang kecil. Dengan susunan organisasi terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 4 (empat) seksi.

VII. Faktor Kesulitan Geografis

Skor akhir hasil pemetaan yang digunakan dalam penentuan tipologi perangkat Daerah diperoleh setelah skor total variabel dikalikan dengan faktor kesulitan geografis yang ditentukan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu);
- b. provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu);
- c. provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma dua);
- d. provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- f. kabupaten/kota di Daerah perbatasan darat Negara dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan
- g. kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima)

Namun terdapat pengecualian untuk beberapa urusan, dengan pertimbangan bahwa urusan tersebut tidak terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat sehingga skor akhir tidak dikalikan dengan faktor kesulitan geografis. Urusan-urusan tersebut antara lain:

1. Sekretariat DPRD
2. Kearsipan
3. Persandian
4. Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Dinas atau Badan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas atau Badan yang bersangkutan. Namun sebagai catatan, UPT yang bisa dibentuk oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sudah ditentukan. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan hanya bisa membentuk UPT berupa satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal, sedangkan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan hanya bisa membentuk UPT berupa rumah sakit Daerah dan Puskesmas. Secara umum, Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 menjadi acuan dalam pembentukan UPT beserta persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukannya.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
- Permendagri 99 Tahun 2018 merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana pengaturan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri.
- Permendagri ini mengatur alur pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah. Dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa pengendalian Penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa pembinaan pengendalian Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimonitor oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas fungsi. Sesuai dengan Pasal 4 Permendagri ini, pembinaan penataan Perangkat daerah meliputi struktur, budaya dan inovasi organisasi.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur harus cermat dan jeli, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis). Kerja sama dengan masyarakat dalam upaya mencari faktor penyebab dan upaya penanggulangannya perlu dilakukan, sehingga anak-anak tidak harus diproses melalui undang-undang ini. Bahkan sedapat mungkin melibatkan diri terhadap anak yang karena sesuatu hal berhadapan dan berkonflik dengan hukum.

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan Permendagri 90 Tahun 2019 adalah untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Permendagri ini pada intinya dijadikan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan di Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dan menjadi panduan dalam penyusunan nomenklatur Perangkat Daerah yang mengalami penggabungan urusan sesuai perumpunan, serta pemisahan program berdasarkan urusan pemerintahan. Hal tersebut diperlukan mengingat penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sudah mensyaratkan nomenklatur Perangkat Daerah, bukan lagi nomenklatur urusan untuk memudahkan dalam pemisahan program dan kegiatan agar tidak saling tumpang tindih.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila, dan memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal nya.

Secara aksiologis, tujuan pembentukan Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam rangka melaksanakan keotonomiannya sebagai Pemerintah Daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pembentukan Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan Raperda ini merupakan bentuk pembagian tugas dan peran Perangkat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis ini menjadi

dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Landasan yuridis dalam pembentukan Raperda ini, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Kabupaten didasarkan pada:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik Pembukaannya maupun di dalam pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Bab XA Perubahan/Amandemen Kedua. Secara khusus termasuk Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, ayat (2) menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “, ayat (5) menyatakan bahwa: “ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur;
9. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
10. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
11. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Asas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menganut asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah yang berarti penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
- b. efisiensi yang berarti pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
- c. efektivitas yang berarti pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;

- d. pembagian habis tugas yang berarti pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah;
- e. rentang kendali yang berarti penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan;
- f. tata kerja yang jelas yang berarti pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal; dan
- g. fleksibilitas yang berarti penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

C. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah akan mengatur tentang:

1. Ruang lingkup pengaturan
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengatur tentang susunan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli dan Kepegawaian.
2. Susunan Perangkat Daerah
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus mengatur tentang Susunan Perangkat Daerah.
3. Unit Pelaksana Teknis
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah.
4. Staf Ahli
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus mengatur tentang Staf Ahli Bupati.
5. Kepegawaian
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus mengatur tentang kepegawaian.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diterbitkannya peraturan tentang pemerintahan daerah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Terkait dengan hal tersebut, salah satu elemen yang perlu dilihat secara mendalam dan komprehensif adalah menyangkut kelembagaan. Oleh karena itu, penataan terhadap kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah.

Penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Oleh karena itu perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Penataan kelembagaan di Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan berdasarkan asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Pelaksanaan asas tersebut perlu diperhatikan secara seksama agar penataan kelembagaan dan pemetaan urusan pemerintahan tidak saling tumpang tindih dan tidak ada urusan yang tidak terselenggarakan.

Secara garis besar pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Timur mengatur tentang susunan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli dan Kepegawaian. Pengaturan tentang susunan Perangkat Daerah mencakup nomenklatur dan tipologi dari Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan hasil dari pemetaan masing-masing urusan yang kemudian dipisahkan dan atau digabungkan menjadi dinas atau badan tertentu. Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis mencakup norma-norma umum dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada dinas atau badan, termasuk batasan bagi Unit Pelaksana Teknis yang bisa dibentuk oleh dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. Pengaturan tentang Staf Ahli memuat tugas dan jumlah maksimal Staf Ahli Bupati yang bisa diangkat serta pengaturan tentang Kepegawaian memuat norma umum pengaturan kepegawaian pasca pembentukan Perangkat Daerah ini disahkan.

B. Saran

Apabila rancangan Perangkat Daerah sebagaimana diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini disetujui sebagian atau seluruhnya, agar dapat segera melakukan pemetaan kebutuhan pejabat administrasi beserta pemetaan jumlah pegawai yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan administrasi untuk menutupi kekurangan/kekosongan jabatan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Darmodihardjo, Dardji, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Fuadi, Munir, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

Hadjon, Philipus M, Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.

Kuani, Goesniadi S., 2010, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, A3 Nasa Media.

LM, Gandhi, 1980, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, FH UI, dalam Mohamad Hasan Warga Kusumah, Ensiklopedia Umum, Kanisius, Yogyakarta.

Mahfud MD, Moch, 1999, Hukum dan Pilar Pilar Demokrasi, Cetakan Pertama, Gama Media Offset, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Suseno, Frans Magnis, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).